

J.E.J.A.K
TRANSFORMASIONAL
SANG PEMIMPIN
JAWA TENGAH

Buku ini merupakan hasil dari Penelitian Interdisipliner Tanggap Covid-19 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2020

MAHATVA YOGA ADI PRADANA
ISKANDAR ZULKARNAIN
RATNA SOFIANA
RIZALDI YUSFIARTO



Jejak Transformasional Sang Pemimpin Jawa Tengah

***Mahatva Yoga Adi Pradana,- Iskandar Zulkarnain,-Ratna Sofiana,-Rizaldi Yusfiarto**

Penyunting: Mahatva Yoga Adi Pradana

Desain Sampul dan isi: Mahatva Yoga Adi Pradana

Foto Cover Dok : Mahatva Yoga Adi Pradana

Diterbitkan oleh:



SUKA Press

Jl. Marsda Adisucipto. Lt 3 Gedung Rektorat Lama (PKSI)

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telp. 085743477290 Fax.(0274)589266/512474

Cetakan 1, Januari 2021

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh

isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

* Mahatva Yoga Adi Pradana,- Iskandar Zulkarnain,-Ratna Sofiana,-Rizaldi Yusfiarto

Jejak Transformasional Sang Pemimpin Jawa Tengah

---Yogyakarta : Suka Press 2021

ix + 136 hlm ; 15 x 23

ISBN 9 786237 816157

1. Politik 2. Judul

Dedication

Buku ini merupakan hasil penelitian selama hampir 2 bulan lebih melihat potret sang pemimpin di Jawa Tengah dalam upaya menangani adanya Pandemi COVID-19. Semoga apa yang menjadi hasil dari penelitian ini dapat dinikmati oleh banyak kalangan.

Tak lupa ucapan syukur dan terima kasih, kami ucapkan kepada Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain yang memberikan kesempatan kepada kami yang masih memulai karir.

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	v
BAB I.....	2
Kelembagaan Regulasi	2
BAB II.....	18
Latar Belakang Kondisi	18
BAB III	28
Sekilas Kondisi Jawa Tengah.....	28
BAB IV	32
Melihat Kepemimpinan Berdasarkan Survey Opini Publik	32
BAB V	52
Melihat Kepemimpinan Dari Survey Pelaku Umkm.....	52
BAB VI	70
Kelembagaan Dan Implementasi Visi Misi	70
BAB VII.....	93
Kepemimpinan Dalam Aspek Managemen	93
BAB VIII	106
Komunikasi Publik Sang Pemimpin	106
BAB PENUTUP	122
Sekelumit Cerita Singkat.....	122

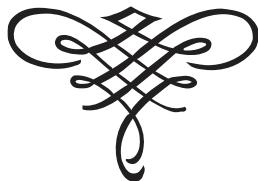
PENGANTAR

VISI PEMIMPIN TRANSFORMATIF

Sekapur Sirih Untuk Buku Jejak Transformasional Sang Pemimpin Jawa Tengah

Apresiasi yang tinggi untuk para dosen muda yang karyanya kini telah hadir dalam bingkai penelitian Interdisipliner Covid-19 tahun 2020 ini. Pada dasarnya kepemimpinan merupakan bentuk fenomena yang lahir dari adanya pengaruh serta kekuatan melakukan organisasi terhadap masyarakat. Kepemimpinan ini secara tidak langsung menunjukkan adanya perilaku patuh terhadap terciptanya tatanan masyarakat yang demokratis. Dampak adanya pandemi Covid-19 saat ini secara tidak langsung memberikan dampak bagi model serta perilaku kepemimpinan di tiap daerah. Kepala daerah harus mampu membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak pandemi. Oleh karena itu penelitian ini berusaha menemukan bentuk kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala daerah yaitu Gubernur Jawa Tengah dalam melembagakan regulasi yang dibangun dalam rangka penanganan dampak Covid-19 pada adaptasi kebiasaan baru.

Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain
Ketua Perhimpunan Profesor Doktor Indonesia (PPDI)



***PEMIMPIN BUTUH KEPEMIMPINAN
UNTUK DAPAT DIPERCAYA OLEH
MASYARAKAT***

B A B I

KELEMBAGAAN REGULASI

“

Dalam upaya memaksimalkan penanganan COVID-19 di seluruh wilayah Jawa Tengah, kami berupaya penuh untuk dapat memberikan yang terbaik bagi warga masyarakat, terutama yang terdampak secara langsung.

“Cuplikan wawancara Ganjar Pranowo”

Pandemi COVID-19 memberikan dampak secara besar bagi terciptanya segala aturan yang berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai objek kebijakan. Dalam rangka menanggulangi adanya pandemi ini, pemerintah berupaya dengan sangat bijak membentuk aturan-aturan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu sebagai upaya penanggulangan pandemi COVID-19 di Jawa Tengah dibuatlah aturan-aturan tersebut.

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tanggal 4 Agustus 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 Tanggal 13 Juli 2020 Tentang Kegiatan Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatapan Normal Baru
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Corona Virus Disease (Covid- 19) Oleh Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19)
8. Surat Edaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kriteria Dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/116 Tahun 2020 Tanggal 29 September 2020 Tentang Satuan

Tugas Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)
Provinsi Jawa Tengah

10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/42 Tahun 2020 Tanggal 15 Maret 2020 Tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Kedua Di Jawa Tengah
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/46 Tahun 2020 Tanggal 6 April 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/42 Tahun 2020 Tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Kedua Di Jawa Tengah
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/43 Tahun 2020 Tanggal 15 Maret 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Provinsi Jawa Tengah (**Dicabut**)
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/44 Tahun 2020 Tanggal 1 April 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/43 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan

Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Provinsi
Jawa Tengah (**Dicabut**)

14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/3 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease (Covid-19) Di Provinsi Jawa Tengah
15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/4 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bangunan/Gedung Sebagai Tempat Karantina Dan Isolasi Untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Di Jawa Tengah
16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Di Provinsi Jawa Tengah Nomor 422.7/71 Tanggal 15 Mei 2020 Tentang Pembentukan Tim Gabungan Pengendalian, Pengawasan Dan Penegakan Hukum Dalam Rangka Pembatasan Perjalanan Orang Pada Masa Pandemik Covid-19
17. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Provinsi Jawa Tengah Nomor 440.1/104 Tanggal 25 Agustus 2020 Tentang Pembentukan Tim

- Kajian Pelayanan Kesehatan Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Di Jawa Tengah
18. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Provinsi Jawa Tengah Nomor 440.1/108 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Provinsi Jawa Tengah
19. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 22 April 2020 Tentang
20. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan Covid-19 Di Tingkat Rukun Warga (Rw) Melalui Pembentukan “Satgas Jogo Tonggo”
21. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Di Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 Tanggal 12 Juni 2020 Tentang Pedoman Bagi Masyarakat Dalam Rangka

Persiapan Menuju Pemulihan Bencana Covid-19 Di Provinsi Jawa Tengah

22. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Provinsi Jawa Tengah Nomor 443.5/0013751 Tanggal 2 Oktober 2020 Tentang Pembentukan Pos Koordinasi Terpadu Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Provinsi Jawa Tengah
23. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Provinsi Jawa Tengah Nomor 443.5/0007143 Tanggal 3 April 2020 Tentang Pelaksana Dan Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Provinsi Jawa Tengah
24. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Provinsi Jawa Tengah Nomor 360/0008481 Tentang Standar Operasional Prosedur Penatausahaan Barang Di Gudang

Wisma Perdamaian Pada Sekretariat Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)
Di Provinsi Jawa Tengah

25. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0010430
Tanggal 27 Juli 2020 Tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Secara
Swakelola Kelompok Masyarakat Dengan Pola Padat
Karya Di Provinsi Jawa Tengah
26. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/005942
Tanggal 14 Maret 2020 Tentang Peningkatan
Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona
Virus Disease (Covid-19) Di Jawa Tengah
27. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 420/0005956
Tanggal 15 Maret 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran
Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Satuan
Pendidikan Di Jawa Tengah
28. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/006405
Tanggal 19 Maret 2020 Tentang Antisipasi Risiko
Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) Pada

10..... Jejak Transformasional Sang Pemimpin Jawa Tengah

Area Tempat Kerja, Fasilitas Umum Dan Transportasi Publik Di Jawa Tengah

29. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0006220 Tanggal 26 Maret 2020 Tentang Penanganan Tenaga Kerja Migran Dari Tempat Perantauan Menuju Wilayah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah
30. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 420/0006228 Tanggal 27 Maret 2020 Tentang Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Di Jawa Tengah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)
31. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 990/0004361 Tanggal 7 April 2020 Tentang Percepatan Penyediaan Apbd Provinsi Jawa Tengah Untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
32. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0007222 Tanggal 9 April 2020 Tentang Tata Cara Pengurusan Jenazah Terinfeksi Covid-19
33. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0007223 Tanggal 9 April 2020 Tentang Kewajiban Penggunaan

Masker Bagi Masyarakat Dan Prosedur Karantina Rumah Bagi Masyarakat Di Jawa Tengah

34. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0007521 Tanggal 17 April 2020 Tentang Penyediaan Pemakaman Umum Bagi Korban Termasuk Tenaga Kesehatan Yang Meninggal Dunia Akibat Wabah Corona Virus Disease (Covid-19)
35. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/03556 Tanggal 17 April 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan Atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19
36. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0007729 Tanggal 22 April 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan, Penatausahaan, Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Jawa Tengah
37. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0004367 Tanggal 12 Mei 2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020

38. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 965/1125 Tanggal 15 April 2020 Tentang Pembinaan Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Upaya Mendukung Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
39. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/0007972 Tanggal 11 Mei 2020 Tentang Kebijakan Daerah Terkait Pembatasan Kegiatan Tertentu Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
40. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 965/1332 Tanggal 29 Mei 2020 Tentang Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Dalam Pelaksanaan Tugas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Masa Tatanan Normal Baru
41. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 965/1341 Tanggal 1 Juni 2020 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Keadaan Darurat Covid-19 Di Provinsi Jawa Tengah

42. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 451/0008315 Tanggal 19 Mei 2020 Tentang Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1441 H Dalam Situasi Darurat Covid-19
43. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/1368 Tanggal 5 Juni 2020 Tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 965/1332 Tentang Sistem Kerja Asn Dalam Tatanan Normal Baru
44. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/1412 Tanggal 11 Juni 2020 Tentang Evaluasi Sistem Kerja Work From Home (Wfh)
45. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0003664 Tanggal 16 Juni 2020 Tentang Percepatan Penanganan Dan Pengendalian Covid-19 Di Kabupaten/Kota
46. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/1697 Tanggal 3 Juli 2020 Tentang Tindak Lanjut Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 383/1578 Tentang Penyampaian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Persiapan Menuju Pemulihian Bencana Covid-19
47. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/1743 Tanggal 8 Juli 2020 Tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Sistem

Kerja Khusus Bagi Aparatur Sipil Negara (Asn) Yang Secara Kesehatan Terdampak Corona Virus Disease (Covid-19) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

48. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0009625 Tanggal 8 Juli 2020 Tentang Pengendalian Pandemi Covid-19 Dan Percepatan Penanganan Kelompok Rentan Di Kabupaten/Kota
49. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/1888 Tanggal 20 Juli 2020 Tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Kegiatan Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Tatanan Normal Baru Dan Perpanjangan Surat Gubernur Nomor 800/1697 Tanggal 3 Juli 2020
50. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/0011684 Tanggal 12 Agustus 2020 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

51. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/0011702 Tanggal 18 Agustus 2020 Tentang Sosialisasi Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19
52. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 450/0009155 Tanggal 19 Juni 2020 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Menuju Persiapan Tatapan Normal Baru (New Normal) Di Provinsi Jawa Tengah
53. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/1434 Tanggal 13 Juni 2020 Tentang Tindak Lanjut Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020
54. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/1435 Tanggal 13 Juni 2020 Tentang Tindak Lanjut Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020

55. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0009057 Tanggal 17 Juni 2020 Tentang Inventarisasi Dokumen Kebijakan Terkait Covid-19 Di Provinsi Jawa Tengah
56. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0009058 Tanggal 17 Juni 2020 Tentang Penyimpanan Arsip Terkait Kebijakan Covid-19
57. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/1912 Tanggal 22 Juli 2020 Tentang Tindaklanjut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional
58. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Provinsi Jawa

Tengah Nomor 180/1967 Tanggal 24 Juli 2020 Tentang
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020
Tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi
Jawa Tengah

59. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0010491 Tanggal 3 Agustus 2020 Tentang Sinergitas Penanganan Covid- 19 Dan Realisasi Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (Jps) Dan Jaring Pengaman Ekonomi (Jpe)

Inilah bentuk aturan yang telah di buat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya menangani Pandemi Covid-19. Tindakan ini diambil dalam rangka mengatur kehidupan masyarakat Jawa Tengah menghadapi kejadian luar biasa. Setidaknya dalam aturan yang dibuat, pemerintah memperhatikan segala rujukan yang berasal dari pemerintah pusat. Karena pada dasarnya Gubernur Jawa Tengah hanya ingin masyarakat dapat terhindar dari segala bentuk permasalahan yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19.

B A B II

LATAR BELAKANG KONDISI

“

Melaksanakan kordinasi, sosialisasi dan edukasi mengenai upaya pencegahan dan pengendalian kepada elemen masyarakat dan pelaku usaha sesuai kewenangannya hingga menyediakan alat deteksi suhu tubuh, hand sanitizer untuk upaya pencegahan dan pengendalian.

“ Himbauan Gubernur Jawa Tengah Maret 2020”

Wabah COVID-19 telah menyebabkan dampak pada berbagai sektor di Indonesia (Bahtiar & Saragih, 2020). Pandemi COVID-19 yang menyebar cepat sampai Indonesia, awalnya berdampak pada sektor transportasi dan pariwisata yang kemudian meluas ke sektor lain, yaitu kesehatan hingga perdagangan. Secara ekonomi, terdapat empat sektor yang paling terdampak wabah COVID-19 yaitu rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan (Puspasari, 2020).

Menurut laporan yang dimuat dalam Forbes pada tanggal 13 April 2020, menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam dua puluh negara yang memiliki resiko tinggi dalam menangani pandemi COVID-19. (Forbes, 2020) Selain itu, Indonesia juga berada dalam kategorisasi rendah negara yang memiliki tingkat keamanan dalam menanggulangi ancaman COVID-19. Sejak diturunkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 pada 31 Maret 2020. Mulai aktivitas pendidikan, perkantoran, keagamaan hingga pelayanan umum dan penggunaan fasilitas publik dibatasi.

Adanya PSBB ini juga memberikan dampak terhadap mekanisme pelayanan publik di banyak daerah terhenti. Semua ini ditunjang dengan adanya SE MENPAN/RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Tujuan dari adanya surat ini mengharuskan aparatur sipil negara untuk bekerja dari rumah (*work from home*).

Lika liku aturan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya berdampak pada mekanisme pelayanan saja. Adanya pemberlakuan sosial berskala besar (PSBB), nyatanya berdampak pada dibuatkanya aturan-aturan di daerah. Pada

PP Nomor 21 tahun 2020, pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa pertimbangan diberlakukannya PSBB di daerah harus melalui persetujuan pemerintah pusat melalui menteri kesehatan. Pada pasal 2, ketentuan di berlakukannya aturan PSBB ini di dasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional serta pertimbangan sosial budaya ekonomi dan politik.

Adanya aturan ini jelas menunjukkan bahwa pemberlakuan PSBB ini masih sangat sentralistik. Meskipun di beberapa daerah telah melakukan alternatif tindakan pencegahan sesuai karakteristiknya masing-masing. (m.Detik.com, 2020)

Di Indonesia, kasus COVID-19 hingga 17 Juli 2020 terkonfirmasi 83 ribu kasus terkonfirmasi. Merujuk Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan pada 13 Juli 2020. Istilah-istilah yang menjadi dasar informasi publik di ubah menjadi kasus suspek, kasus *probable*, kontak erat, kasus konfirmasi yang kemudian itu dibagi dua, yakni konfirmasi dengan gejala (*simptomatik*) dan konfirmasi tanpa gejala (*asimptomatik*).

Penambahan kasus COVID-19 yang terjadi pada 34 provinsi yang ada termasuk Jawa Tengah yang sampai tulisan ini dibuat menempati posisi ke empat, setelah Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatra Selatan.

Tata kelola pemerintah daerah nampaknya memberikan ruang baru dalam terciptanya desentralisasi secara penuh yang dilakukan kepala daerah seperti Gubernur Jawa Tengah. Pola kepemimpinan ini begitu banyak dilihat oleh banyak masyarakat terkait pengelolaan administrasi publik. Selain dampak ekonomi, pandemi juga berpengaruh besar pada lingkup sosial politik. Secara sosial, masyarakat menginginkan kemudahan dalam mekanisme pelayanan.

Eva Sorensen & Jacob Torfing (2011) ikut menegaskan bahwa salah satu keberhasilan demokrasi terlihat dari kemampuan menciptakan inovasi layanan publik melalui ide-ide progresif sangat bergantung dari kolaborasi stakeholder yang terkait dalam hal ini pemerintah, masyarakat, dan swasta. Karena itu pemerintahan partisipatif sebagai salah satu basis dasar demokrasi hanya dapat berjalan tegak ketika kebijakan yang dihasilkan mendapat dukungan penuh dari publik.

Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) semakin terdampak, sehingga mengalami berbagai persoalan karena adanya pembatasan kegiatan fisik dan sosial (physical and social distancing) (Andrianita, 2020). Berdasarkan pemetaan dampak COVID-19 yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, sekitar 56,66% UMKM di Jawa Tengah mengalami permasalahan terkait dengan pemasaran, 25,28% mengalami permasalahan pembiayaan, dan 12,12% mengalami persoalan lain-lain, serta 5% mengalami kesulitan bahan baku, dan 0,94% mengalami kesulitan produksi (Dinkop UMKM, 2020).

Konstitusi negara Indonesia telah menjamin adanya jaminan kesehatan bagi warga negaranya, dengan terejawantahkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Artinya Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan dan memberikan jaminan yang sesuai dengan amanat konstitusi. Karena warga negara Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum sesuai dengan Konsep Hak Asasi Manusia untuk memberikan keadilan dan mensejahterakan rakyatnya tanpa membedakan kelas sosial.

Dengan adanya jaminan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah, maka jika terdapat permasalahan di negara ini seperti merebaknya COVID-19 dapat teratasi dengan adanya jaminan tersebut. Secara *historical context*, COVID-19 merupakan penyakit menular yang mulai berkembang di tahun 2019 yang sampai saat ini menjadi permasalahan utama di seluruh dunia.

Awal keberadaannya yaitu berasal dari Wuhan, Tiongkok yang disebabkan berasal dari salah satu hewan liar yaitu kelalawar (Yuliana: 2020) . Dampak dari terkenanya COVID-19 bagi individu yang terinfeksi yaitu akan mengalami gangguan pernafasan ringan hingga dapat menyebabkan kematian (Whang Zoe: 2020) . World Healt Organization melansir data yang berhasil menginfeksi 827.419 jiwa pada 203 negara dengan kasus sejumlah 827.419 dan dengan angka kematian 40.777 jiwa, yang menyebabkan 4.291 orang meninggal dunia (WHO: 2020).

Dengan data yang telah terpublish di Media Sosial bahkan televisi yang dilihat oleh masyarakat menimbulkan kegelisahan yang sangat menghunjam kalangan masyarakat. Akibatnya sifat masyarakat yang tamak untuk membeli kebutuhan sehari-hari menjadi pemicu utama keretakan dari asas gotong royong, bahkan di saat

merebaknya COVID-19 masih ada kalangan yang meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan menimbun masker-masker yang telah disediakan untuk diperjualbelikan dengan harga yang tinggi.

Dalam penangan COVID-19, kebijakan pemerintah justru mengalami disharmonisasi antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan kebijakan Pemerintah Daerah. Perbedaan tersebut dimulai ketika beberapa daerah menetapkan *Lockdown*. *Lockdown* atau karantina wilayah merupakan penerapan karantina terhadap suatu daerah atau wilayah tertentu dalam rangka mencegah perpindahan orang, baik masuk maupun keluar wilayah tersebut, untuk tujuan tertentu yang mendesak.

Kebijakan *lockdown* ini diterapkan oleh sebuah negara yang mengalami keadaan darurat seperti perang atau wabah penyakit yang menular. Kemudian istilah ini banyak dikenal akibat adanya pandemi penyakit koronavirus 12019 yang tersebar di berbagai negara secara massif. Namun pemerintah pusat menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan istilah karantina kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai “pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga.

Perubahan mekanisme pelayanan yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah dalam masa pandemi tentu berdampak pada tata kelola pemerintahan. Ada mekanisme utama yang mengharuskan kebijakan pemerintah daerah harus sesuai dengan protokol kesehatan yang dibuat pemerintah. Sebagai mana yang diketahui kenormalan baru ini membutuhkan proses serta kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi ditingkatkan. Sehingga, untuk menjawab tantangan dari tuntutan masyarakat terbuka, pemerintah harus mengganti paradigma sistem tata kelola pemerintahan.

Open government sudah menjadi platform untuk meningkatkan kualitas pelayanan berbasis teknologi, dimana karakter atau ciri khas *open government* adalah adanya transparansi, partisipasi, dan kolaborasi (Turner, 2015, Theressa et al., 2011). Penggunaan teknologi menjadi hal yang wajib untuk menghadirkan ruang partisipatif dan kolaborasi antara pemerintah dan warga negara (Campos, 2013, Geiger dan Von Lucke, 2013). Melalui teknologi informasi pula warga negara selain dapat memberikan pengaruh/masukan (Hilgres, 2012) juga sekaligus bisa memantau secara penuh proses pengambilan kebijakan publik (Meijer et al, 2012).

Menyambut adaptasi kebiasaan baru keinginan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan menjadi harapan utama. Mekanisme yang pada awalnya ditempuh dengan hanya satu hari, untuk sekarang bisa berhari-hari karena proses pelayanan dibatasi dan dengan protokol yang ketat. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan publik dapat terhambat.

Seiring dengan hal itu, pemerintah perlu menciptakan kondisi yang kompetitif diantara lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan lembaga lain menyangkut kualitas layanan dalam tatanan normal baru. Bentuk ini dilakukan dalam rangka melaksanakan transformasi birokrasi untuk memberikan manfaat besar, menyangkut tatanan normal baru membutuhkan *covering* masyarakat sebagai bentuk birokrasi unggul. Dengan begitu dalam menyambut tatanan normal baru, masyarakat dapat memiliki control yang besar, memahaminya dan menjadikan mekanisme yang akan dibuat menjadi budaya sehari-hari.

Berangkat dari krisis kebijakan dalam penanganan COVID-19 serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap pejabat publik. Kecenderungan yang ada dalam perubahan peran kelembagaan birokrasi telah memberi nuansa baru. Dibutuhkan model penanganan yang disesuaikan dengan

lokalitas masyarakat. Sehingga pemerintah daerah dapat menyelenggarakan mekanisme pelayanan publik sesuai dengan protokol kesehatan tanpa harus menimbulkan dampak sosial politik yang berkepanjangan. Selama masa pandemi ini belum berakhir, pemerintah daerah harus berupaya menemukan identitas baru. Semua ini dilakukan karena pemerintah secara serius menyempurnakan kelembagaan birokasinya hidup berdampingan dengan COVID-19 bagi birokrasinya. Hal ini dapat disimak dari berbagai program pemerintah di negara maju, yang secara serius memperhatikan penyempurnaan birokrasinya.

BAB III

SEKILAS KONDISI JAWA TENGAH

“

Akan nambah lagi. Saya sudah sampaikan delay-nya saja 3000, kalau ditambah lagi pasti akan tinggi dan beberapa minggu ini Jateng masih akan meningkat.

“ Kata Ganjar Pranowo di Kantornya (26/11/2020)”

Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Jawa, letaknya diapit oleh dua provinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Terletak diantara $5^{\circ}40'$ dan $8^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan antara $108^{\circ}30'$ dan $111^{\circ}30'$ Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa). Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Luas wilayah Jawa

Tengah tercatat sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa (1,70 persen dari luas Indonesia)

Penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 34.718 ribu jiwa yang terdiri atas 17.212,46 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 17.505,75 ribu jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2018, penduduk Jawa Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 0,78 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 98,32.

Kepadatan penduduk di Jawa Tengah tahun 2019 mencapai 987,26 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 35 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kota Surakarta dengan kepadatan sebesar 10.852,79 jiwa/ km² dan terendah di Kabupaten Blora sebesar 459,79 jiwa/Km²

Di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, persentase penduduk yang masih sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun (kelompok usia SD/MI) sebesar 99,77 persen,

kelompok umur 13-15 tahun (kelompok usia SMP/MTs) sebesar 96,11 persen, kelompok umur 16-18 tahun (kelompok usia SMA/MA) sebesar 69,65 persen, dan kelompok umur 19-24 tahun (kelompok usia PT) sebesar 22,41 persen. Secara keseluruhan pada kelompok umur 7-24 tahun persentase penduduk yang masih sekolah sebesar 68,93 persen.

Data menunjukkan, bahwa masih terdapat penduduk yang tidak/belum pernah bersekolah pada kelompok usia jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs). Sebanyak 0,05 persen penduduk usia 7-12 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah dan 0,11 persen pada kelompok usia 13-15 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi penyangga pangan nasional, oleh karena itu produktivitas padi lebih diutamakan untuk terus dipacu. Pada tahun 2019, produktivitas padi sawah sebesar 57,53 Kuntal per hektar, dengan luas panen padi sawah 1,68 juta hektar dan jumlah produksi padi sawah 9,65 juta ton. Produktivitas padi di Kabupaten Sukoharjo adalah tertinggi di antara produktivitas padi di kabupaten/ kota lain, yakni sebesar

69,19 kuintal per hektar. Sedangkan produktivitas terendah tercatat di Kabupaten Rembang yaitu sebesar 44,04 kuintal per hektar.

BAB IV

MELIHAT KEPEMIMPINAN BERDASARKAN SURVEY OPINI PUBLIK

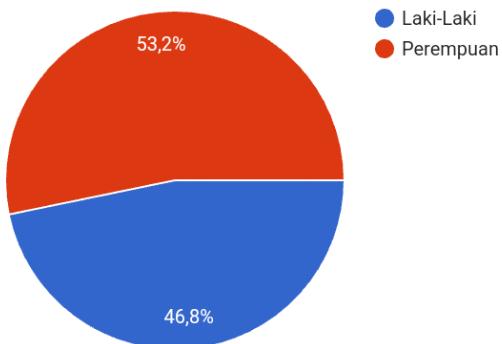
“

Salah satu dampak positif adanya COVID-19 ini adalah naiknya tingkat popularitas para kepala daerah, diantaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Burhanudin Muhtadi di Kompas Tv “

Responden penelitian ini menggunakan sampel 480 Responden yang berada di seluruh Wilayah Jawa Tengah, dengan pembagian masing-masing 32 Responden di setiap Kota/Kabupaten di Jawa Tengah. Peneliti mengelompokkan responden dalam beberapa karakteristik yaitu, jenis kelamin, usia, agama, pendidikan, pekerjaan.

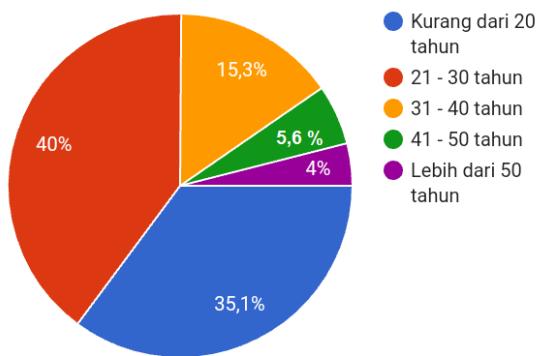
Jenis Kelamin

**Gambar 1 Jenis Kelamin**

Pelaksanaan survey ini dilakukan dengan memperhatikan karakteristik jenis kelamin dimana dalam penentuan sampel/responden peneliti sudah menetukan responden berdasarkan metode yang dibangun. Penelitian ini bersumber pada rincian 46,8 persen responden laki-laki atau sebanyak 225 responden dan 53,2 persen responden perempuan atau sebanyak 255 responden. Penentuan ini di dasarkan secara seimbang pada jumlah populasi yang dipilih sebesar 480 responden. Mekanisme ini diambil dengan memperhatikan pemahaman individu dalam menyerap

informasi yang berkenaan dengan program kerja dan kebijakan kepala daerah, khususnya Gubernur Jawa Tengah.

Usia Responden

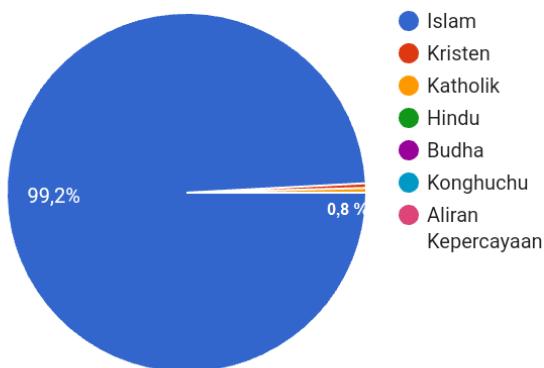


Gambar 2 Usia Responden

Pemilihan karakteristik kedua yang dilakukan oleh peneliti di dasarkan pada usia. Ini dilakukan dalam rangka membentuk pemahaman yang heterogen. Peneliti memiliki pendapat bahwa usia mempengaruhi tingkat pemikiran masing-masing individu. Oleh karena itu pengelompokan usia di sesuaikan dengan rentang mulai dari dibawah 20 tahun hingga diatas 50 tahun. Hasilnya terdapat kurang dari 20 tahun dengan 35,1 persen sejumlah 168 responden, 21-30

tahun sejumlah 40 persen dengan 192 responden, usia 31-40 tahun sejumlah 15,3 persen dengan 73 responden, usia 41-50 tahun sejumlah 5,6 persen dengan 28 responden dan lebih dari 50 tahun dengan jumlah 4 persen sejumlah 19 responden. Data ini menunjukkan usia responden yang potensial berada pada tingkatan 21-30 tahun.

Agama



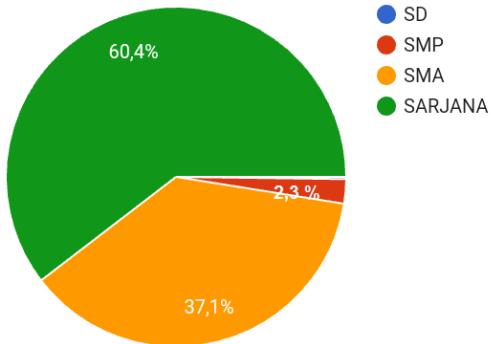
Gambar 3 Agama

Ketiga, peneliti menggunakan indikator Agama untuk menjabarkan pemahaman responden melihat kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah. Peneliti mendapatkan hasil bahwa 99,2 persen responden berasal

dari Agama Islam dan 0,8 persen dari Kristen serta Katholik. Representasi agama bagi seorang pemilih dalam memberikan pemahaman pada kebijakan kepala daerah yang seagama menunjukkan sangat penting. Mereka berada dalam ruang identitas agama yang serupa. Oleh karena itu faktor agama kerap kali memberikan dampak lain yang dapat menentukan perubahan hasil survey.

Seringkali dalam penelitian faktor agama ini mempengaruhi tingkat pemahaman serta pengetahuan responden dalam menjawab kuisioner. Meskipun peneliti sudah memetakan wilayah secara tersusun namun faktor dominasi agama yang serupa membentuk tingkat keaktifan masyarakat sebagai responden untuk mengisi.

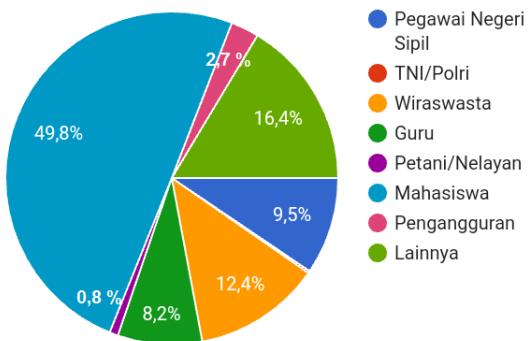
Pendidikan



Gambar 4 Tingkat Pendidikan

Keempat, tingkat pendidikan digunakan sebagai indikator karakteristik responden dengan membaginya ke dalam empat tingkatan mulai dari SD, SMP, SMA, Sarjana. Dari penyebaran survey yang dilakukan diperoleh 60,4 persen sarjana dengan 290 responden, 37,1 persen berasal dari SMA dengan 178 serta 2,3 persen SMP dengan 11 responden. Peneliti menemukan linieritas hasil data dengan tingkat usia produktif dengan tingkat pendidikan yang tinggi.

Pekerjaan



Gambar 5 Pekerjaan

Kelima, peneliti menggunakan pekerjaan untuk mendapatkan data yang heterogen dengan hasil Mahasiswa mendapatkan 49,8 persen, lainnya 16,4 persen, wiraswasta 12,4 persen, pegawai negeri sipil 9,5 persen dan 2,7 persen pengangguran sedang sisanya 0,8 persen petani dan nelayan. Ini menunjukkan bahwa tingkat pekerjaan yang berbeda dapat memberikan pemahaman yang baik bagi hasil penelitian ini. Disini mahasiswa mendominasi dengan 239 respon yang telah memberikan kemanfaatannya dalam proses pengisian kuisioner.

Hasil dari penelusuran yang dilakukan oleh tim peneliti selama 2 bulan menunjukkan banyak sekali hal yang dapat dilihat sebagai bentuk dukungan masyarakat akan kebijakan yang dilakukan oleh kepala daerah. Sebagai bentuk pemenuhan pengetahuan yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa indikator yang digunakan sebagai alat melihat sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap program penanggulangan COVID-19 di Jawa Tengah.

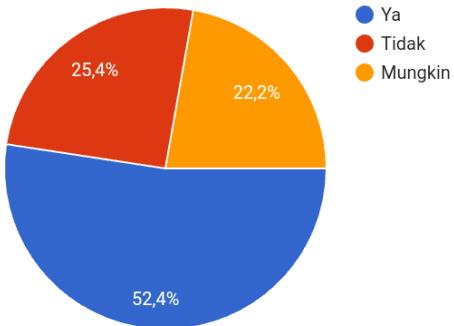
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerbitkan surat edaran terkait peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi COVID-19 atau Virus Corona, pada sabtu tanggal 14 maret 2020. Surat edaran tersebut ditujukan kepada Bupati atau Walikota, pimpinan perangkat daerah, pimpinan instansi vertical serta seluruh pimpinan BUMN Jawa Tengah.

Dalam suratnya Gubernur Jawa Tengah menyampaikan perlunya upaya pencegahan dan pengendalian melalui empat langkah. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan edukasi mengenai upaya pencegahan dan pengendalian kepada elemen masyarakat

dan pelaku usaha sesuai kewenangannya. Menyampaikan agar seluruh instansi melakukan pencegahan sedini mungkin dengan menyediakan berbagai peralatan dan kebutuhan pengecek kondisi tubuh dengan menyediakan alat deteksi suhu tubuh, *hand sanitizer* serta masker bagi yang sakit untuk mendukung upaya pencegahan dan pengendalian. Serta memastikan tempat umum dalam keadaan bersih dan higienis.

Selain itu Ganjar juga menginstruksikan agar dilakukan penundaan atau membatasi kegiatan yang menghadirkan banyak orang pada tempat-tempat umum seperti *car free day*, berkemah, *study tour* dan lain sebagainya. Poin keempat membentuk posko informasi terpadu di masing-masing instansi.

Apakah anda mengetahui program
Gubernur Jawa Tengah dalam
penanggulangan Covid-19 ?



Gambar 6 Tingkat Pemahaman Program

Ketika Gubernur mengambil langkah kebijakan yang strategis dalam rangka penanggulangan dampak pandemi ini peneliti melihat hasil yang ada bahwa 52,4 persen masyarakat mengetahui program apa saja yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan COVID-19. Sedangkan 22,2 persen mengatakan mungkin mengetahui dan 25,4 persen tidak mengetahui program. Berdasarkan data yang ada peneliti berupaya melihat bagaimana tingkat pemahaman ini dengan

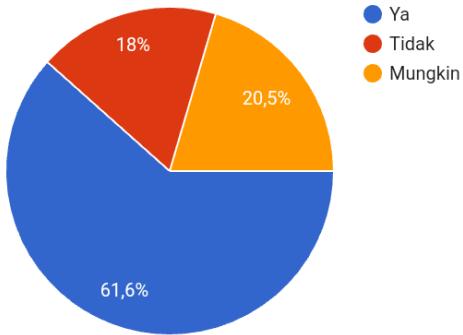
menghubungi langung responden. Secara tidak langsung yang ditemukan di lapangan bahwa, :

“ niku kang damel menehi baksos kemawon kulo mboten ngertosim as, pun supe menawi penyakit kuwi yo bakal ilang, trus mas masyarakat niki sampun kebal mula pemerintah sampun mboten sisah damel kegiatan-kegiatan”

“ itu yang membuat pemberian bantuan saja saya tidak tahu dan dapat, sampai lupa bahwa penyakit akan hilang, selain itu masyarakat sudah kebal oleh karenanya pemerintah tidak perlu membuat kegiatan-kegiatan lagi” (wawancara narasumber di Grobogan 16 November 2020)

Beragam upaya yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah dalam menghadapi pandemi ini disesuaikan dengan aturan yang berasal dari pusat. Kemampuan pemerintah provinsi dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai bentuk antisipasi terhadap bencana ditunjukkan dalam beberapa kebijakan yang sudah dibuat. Kebijakan ini juga kemudian di berlakukan dalam bentuk kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat. Peneliti melihat respon yang baik masyarakat dalam mengetahui program pemerintah, kemudian dari program tersebut masyarakat apakah sudah mengetahui secara langsung kegiatan yang dilakukan

Apakah anda mengetahui kegiatan
yang dilakukan dalam rangka
penanggulangan Covid-19 ?



Gambar 7 Tingkat Pengetahuan

Berdasarkan data yang di dapatkan oleh peneliti di dapatkan bahwa 61,6 persen masyarakat mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Selain itu 20,5 persen mengatakan mungkin mengetahui kegiatan dan 18 persen tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan. Secara tidak langsung hasil yang di dapatkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan COVID-19 ini sudah berjalan baik karena tidak kurang dari

20 persen masyarakat yang tidak mengetahui. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu narasumber bahwa :

“ kegiatan yang dilakukan oleh Pak Ganjar yang menjadi unggulan ya *Jogo Tonggo* itu mas, gimana caranya kita ini masyarakat bersama sama gayeng saling menjaga kampungnya dari bahaya corona iki, jadi sekarang semuanya dihidupkan lagi mulai bersih-bersih bareng, ronda bareng yaa sambil dolan bareng njogo desane..”

Gerakan *Jogo Tonggo* yang diketahui oleh masyarakat merupakan konsep percepatan penanganan *pageblug* (bencana) pandemi COVID-19 berbasis masyarakat yang ditetapkan di Jawa Tengah. *Jogo* merupakan frase dalam bahasa Jawa yang berarti jaga atau menjaga, dan *tonggo* berarti tetangga, maknanya adalah saling menjaga tetangga.

Pertimbangan bahwa masyarakatlah yang berhadapan langsung dengan penularan COVID-19, sehingga pencegahannya harus menempatkan mereka sebagai garda terdepan bersama pemerintah yang selalu mendukung. Konsep dilaksanakan pada tingkat Rukun Warga (RW) yang melibatkan masyarakat secara langsung untuk saling menjaga tetangga yang terdampak wabah, terpapar virus corona, dan secara langsung terdampak

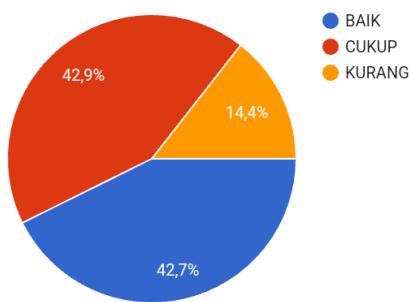
secara ekonomi. Pada beberapa kabupaten dan kota, Jogo Tonggo menjadi alternatif pilihan sebelum kebijakan PSBB diterapkan, karena ini akan berdampak lebih rumit.

Pemimpin daerah yang membentuk aturan serta pelaksanaan implementasi kebijakan secara tidak langung harus memiliki visi serta misi untuk dapat menangulangi konflik yang ada. Pandemi adalah konflik yang memiliki dampak tidak hanya dari satu sektor kesehatan saja melainkan sektor lain yang terdampak juga. Dalam sebuah pandangan kepemimpinan, pemimpin berkewajiban untuk dapat melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang disesuaikan dengan tindakan pada bentuk kebijakan yang disusun.

Pemimpin adalah seorang yang dipilih dari kelompoknya karena memiliki kelebihan-kelebihan tertentu, selanjutnya diberi tugas untuk memimpin anak buahnya mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kelompok. Untuk kelancaran tugas diberikan hak-hak istimewa dibandingkan dengan anggota kelompok lain. Pemimpin dapat diterima bawahan karena dipilih diantara mereka.

Tingkat pengetahuan masyarakat akan kebijakan serta kegiatan yang sudah dibuat oleh pemimpin di daerah menunjukkan bahwa apa yang dibuat Gubernur dalam visi misinya menanggulangi pandemi COVID-19 di Jawa Tengah ini sudah berjalan baik dengan 80 persen lebih masyarakat yang mengatakan ya mengetahui. Dari tingkat pemahaman yang sudah diketahui oleh peneliti kemudian melihat bagaimana pandangan masyarakat akan program yang sudah berjalan dalam menanggulangi covid-19 di Jawa Tengah.

Bagaimana pandangan anda tentang program yang dibuat oleh Gubernur Jawa Tengah dalam penanggulangan Covid-19 ?



Gambar 8 Tingkat Penerimaan

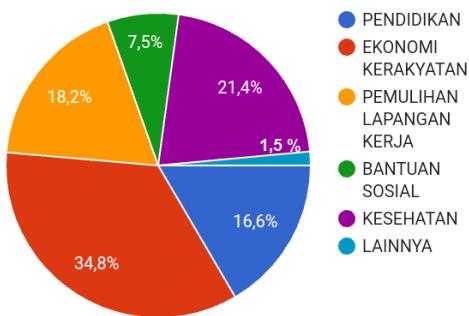
Dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya, kepala daerah sejatinya harus memiliki visi misi yang dapat diturunkan menjadi program kebijakan. Pada dasarnya kepemimpinan menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi tidak sebaliknya, mirip dengan kekuasaan, kepemimpinan merupakan suatu hubungan antara pihak yang memiliki pengaruh dan orang yang dipengaruhi, dan juga merupakan kemampuan menggunakan sumber pengaruh secara efektif. Berbeda dengan kekuasaan yang terdiri atas banyak jenis sumber pengaruh, kepemimpinan lebih menekankan pada kemampuan menggunakan persuasi untuk mempengaruhi pengikut. Selain itu, tidak seperti kekuasaan yang belum tentu menggunakan pengaruh untuk kepentingan bersama pemimpin maupun para pengikutnya.

Sebagai langkah strategis Gubernur Jawa Tengah memiliki berbagai kebijakan yang sudah dilakukan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Peneliti melihat beragam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi sudah diketahui oleh masyarakat serta mendapatkan apresiasi dengan ikut serta masyarakat dalam program tersebut. Berdasarkan analisa awal peneliti dalam melihat

dampak sosial politik serta ekonomi dalam pandemic di Jawa Tengah masyarakat melihat perlu adanya tindak lanjut dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Menurut hasil yang ada sebagian besar responden menginginkan adanya keberlanjutan program ekonomi kerakyatan yang dapat memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19 ini sebesar 35,8 persen. Selain program ekonomi kerakyatan, perlu adanya sarana dan prasarana yang mendukung bidang kesehatan sebesar 21,4 persen karena sampai hari ini laporan penelitian ini dibuat tingkat kenaikan positif Covid-19 di Jawa Tengah terus meningkat. Disisi lain bidang pemulihan lapangan kerja 18,2 persen, pendidikan 16,6 persen serta bantuan sosial 7,5 persen.

Menurut anda, sektor apa yang penting untuk menjadi prioritas penanganan oleh Gubernur Jawa Tengah ?



Gambar 9 Sektor Prioritas

Penguatan kepemimpinan Kepala Daerah ini dalam rangka menanggulangi COVID-19 di Jawa Tengah ini sangatlah menarik untuk dapat dijabarkan berkenaan dengan aspek bidang yang menjadi perhatian masyarakat untuk mendapatkan tindak lanjut. Dalam proses pengumpulan data responden yang ada, surveyor juga sempat melakukan wawancara dengan warga di Kelurahan Tingkir Tengah, Kota Salatiga pada 8 November 2020 bahwa:

“ saya ini pelalu usaha sejak lama, corona ini ya menghambat sebenarnya meskipun sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah ya lewat bansos umkm dan kartu pra kerja, tapi yaa kalo hanya dibantu saja tanpa adanya tindak lanjut yaa akan sama saja,mending bantuan bantuan gitu dikurangi, langsung saja masyarakat kaya saya ini di fasilitasi untuk menjual dagangan” (wawancara narasumber 8 November 2020)

Tatanan *new normal* dan kebiasaan baru yang muncul bagi para pekerja di sektor pemerintahan maupun privat akibat pandemi COVID-19 mewabah, menuntut setiap orang untuk jadi leader atau pemimpin bagi dirinya sendiri yang mampu membaca situasi dan menyesuaikan diri. Tak dipungkiri, kebijakan pembatasan sosial berskala besar secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi roda kegiatan di seluruh sektor kehidupan.

Kemampuan kepala daerah dalam menjelaskan visi misinya ini ditunjang pada kepemimpinan dalam melembagakan kebijakan penanggulangan COVID-19. Oleh karena itu di dasarkan pada tingkat pengetahuan, pemahaman serta andil dalam kegiatan yang dibuat menunjukkan masyarakat telah merespon baik kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah dalam

melembagakan kebijakan yang dibuat. Pendapat ini sejalan dengan yang dikatakan oleh narasumber yang berada di Kelurahan Mangkang Kulon, Kota Semarang bahwa,

” pak Ganjar kuwi orangnya mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara baik dengan lingkungan sekitarnya dalam rangka menyerap aspirasi, lainnya itu yaa dapat membangun simpati dan dapat diterima masyarakat..”(wawancara narasumber 20 November 2020)

Kepemimpinan yang tercipta dari apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah secara tidak langsung memberi gambaran bahwa pemimpin sudah bertransformasi kedepan dalam upaya penanggulangan dampak sosial politik COVID-19 pada kebiasaan baru. Melalui penciptaan visi, pemimpin mengintegrasikan dan mengarahkan usaha-usaha semua anggota organisasi. Pemimpin efektif mengenali pentingnya visi. Segala sesuatunya, pemimpin harus melakukan sesuai dengan visi atau mendukung visi. Fungsi utama pemimpin adalah menetapkan visi untuk organisasi dan mengkomunikasikan visi dengan cara yang menarik kepada bawahan. Visi didefinisikan sebagai gambaran yang akan datang yang unik dan ideal.

BAB V

MELIHAT KEPEMIMPINAN DARI SURVEY PELAKU UMKM

“

Ditengah Pandemi saat ini, penting untuk kita mendorong, memfasilitasi dan melihat para pelaku UMKM agar mereka tetap semangat dan bisa bertahan. Meskipun belum bisa pulih, tapi setidaknya saya akan terus kasih semangat mereka semuanya, agar memiliki mental baja menghadapi pandemic dalam berbisnis,” Kata Ganjar Pranowo

Kali ini peneliti melihat kesinambungan antara pemahaman masyarakat dalam bingkai kebijakan UMKM. Data disajikan guna melihat profil penelitian serta hubungan dari setiap variabel yang pakai dalam penelitian, sehingga hasil penelitian dapat merepresentasikan kondisi di lapangan (Hair et al., 2010). Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa

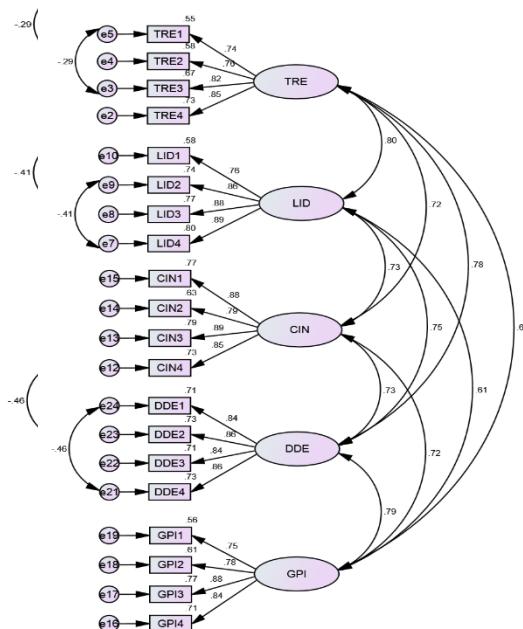
majoritas responden ada pada bidang bisnis *travel service* dan *fashion store* (> 20%). Responden dalam penelitian ini adalah pengusaha UMKM di Jawa Tengah, dengan total *sample* 141 pengusaha UMKM. Berdasarkan tabel yang telah dipaparkan, mayoritas responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah UMKM di kota Semarang, Solo, Magelang (> 10%).

Tabel 1
Frekuansi Responden

	Frekuensi	Jumlah	Prosentase
Kota	Tegal	10	7.1%
	Sukoharjo	11	7.8%
	Solo	18	12.8%
	Semarang	19	13.5%
	Purbalingga	9	6.4%
	Salatiga	8	5.7%
	Pekalongan	12	8.5%
	Pati	7	5.0%
	Magelang	17	12.1%
	Kudus	7	5.0%
Bidang Bisnis	Klaten	9	6.4%
	Grobogan	14	9.9%
	Jasa Travel	20	14.2%
	Fotocopy dan ATK	15	10.6%
	Jasa Kontraktor	12	8.5%
	Makanan Olahan	13	9.2%
	Restauran	18	12.8%
	Toko Besi dan Bangunan	11	7.8%
	Toko Klontong	22	15.6%
	Toko Pakaian	30	21.3%

Sumber: *Output Penelitian (2020)*

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukam fungsi ukurannya (Ferdinand, 2002). Sedangkan Reliabilitas suatu test merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliable (Ferdinand, 2002; Jöreskog, 1969)



Gambar 10

Confirmatory Factors Analysis Result

Pengukuran uji validitas dan reliabilitas menggunakan pendekatan *confirmatory factors analysis* (CFA), CFA digunakan untuk mengetahui besaran variansi dan *standardized factors loading*. Selanjutnya, reliabilitas konstruk penelitian diukur menggunakan nilai dari composite reliability (CR) dan cronbach alpha (CA) dan validitas data diukur menggunakan nilai dari average varians extract (AVE). Nilai cut off yang direkomendasikan untuk composite reliability dan cronbach alpha ada pada rentang > 0,70 sedangkan nilai AVE yang direkomendasikan ada pada rentang > 0,50 (Hair et al., 2010; Nunnally & Bernstein, 1994).

Tabel 2
Uji Valditas Konvergen

<i>Latent Variables</i>	<i>Manifest Variables</i>	<i>Loadings</i>	<i>Loading²</i>	$\Sigma Loading^2$	AVE	<i>Square Root AVE</i>
Penundaan Pajak	TRE4	0.855	0.731025	2.525235	0.631	0.795
	TRE3	0.817	0.667489			
	TRE2	0.761	0.579121			
	TRE1	0.740	0.547600			
Hutang Bunga Rendah	LID4	0.892	0.795664	2.886502	0.722	0.849
	LID3	0.875	0.765625			
	LID2	0.862	0.743044			
	LID1	0.763	0.582169			
Insentif Modal Kerja	CIN4	0.854	0.729316	2.922526	0.731	0.855

	CIN3	0.888	0.788544			
	CIN2	0.795	0.632025			
	CIN1	0.879	0.772641			
Partisipasi Pemerintah	GPI4	0.843	0.710649	2.653089	0.663	0.814
	GPI3	0.880	0.774400			
	GPI2	0.782	0.611524			
	GPI1	0.746	0.556516			
Penundaan Beban Hutang	DDE4	0.856	0.732736	2.883408	0.721	0.849
	DDE3	0.844	0.712336			
	DDE2	0.856	0.732736			
	DDE1	0.840	0.705600			

Sumber: *Output SPSS (2020)*

Tabel 3
Uji Validitas Diskriminan

<i>Variables</i>	<i>Correlation</i>	<i>Confidence interval</i>	<i>Chi-Squared Differences</i>
TRE <--> LID	0.80***	(0.68; 0.89)	(gl = 1; <i>p</i> < 0.01)
TRE <--> CIN	0.72***	(0.57; 0.84)	(gl = 1; <i>p</i> < 0.01)
TRE <--> DDE	0.78***	(0.62; 0.88)	(gl = 1; <i>p</i> < 0.01)
TRE <--> GPI	0.68***	(0.49; 0.81)	(gl = 1; <i>p</i> < 0.01)
LID <--> CIN	0.73**	(0.58; 0.84)	(gl = 1; <i>p</i> < 0.01)
LID <--> DDE	0.75***	(0.60; 0.86)	(gl = 1; <i>p</i> < 0.01)
LID <--> GPI	0.61***	(0.43; 0.76)	(gl = 1; <i>p</i> < 0.01)
CIN <--> DDE	0.73***	(0.58; 0.84)	(gl = 1; <i>p</i> < 0.01)
CIN <--> GPI	0.72***	(0.57; 0.82)	(gl = 1; <i>p</i> < 0.01)
GPI <--> DDE	0.79***	(0.69; 0.88)	(gl = 1; <i>p</i> < 0.01)

Notes: significant at 0.01** ; 0.001***

Sumber: *Output SPSS (2020)*

Hasil pengolahan data terhadap variansi dalam analisis CFA yang dilakukan menggunakan software AMOS menunjukan hasil (lihat tabel 2 dan 3):

- a. Output pengukuran menunjukkan nilai AVE dalam setiap konstruk ada pada rentang 0,631 sampai dengan 0,731, sedangkan nilai akar AVE ada pada rentang 0,795 sampai dengan 0,855. Dapat disimpulkan bahwa data berada padat tingkat *high convergent validity* dikarenakan secara keseluruhan berada pada cut off value yang direkomendasikan ($> 0,50$).
- b. Validitas deskriminan diukur menggunakan nilai korelasi antar konstruk dan nilai signifikansinya, nilai korelasi antar konstruk direkomendasikan tidak lebih dari 0.80 dan berada pada tingkat signifikansi < 0.01 . Hasil menunjukkan bahwa secara kesleuruhan nilai korelasi tidak melebihi 0,80 dan mayoritas korelasi berada pada tingkat signifikansi 0,001. Dengan demikian dapat disimpulkan data penelitian berada pada tingkat *high discriminant validity*.

Secara keseluruhan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa setiap instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid. Sehingga alat ukur (instrument penelitian) dapat digunakan dalam mengintepretasikan gagasan yang diperoleh dari jawaban responden.

Pengujian berikutnya merupakan uji reliabilitas data, output menunjukkan nilai CR setiap konstruk ada pada rentang 0,892 sampai dengan 0,925. Sedangkan nilai CA menunjukkan ada pada rentang 0,854 sampai dengan 0,914 (lihat tabel 4). Secara statistik berdasarkan nilai (CA dan CR $> 0,70$), dapat disimpulkan bahwa konstruk penelitian berada pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi yang tinggi.

Tabel 4
Uji Reliabilitas Data

<i>Latent Variables</i>	<i>Manifest Variables</i>	<i>Loadings</i>	<i>Error</i>	Σ <i>Error Loadings</i>	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cornbach's Alpha</i>
Penundaan Pejak	TRE4	0.855	0.179	1.219	0.892	0.854
	TRE3	0.817	0.226			
	TRE2	0.761	0.392			
	TRE1	0.740	0.422			
Hutang Bunga Rendah	LID4	0.892	0.151	1.035	0.917	0.900
	LID3	0.875	0.196			
	LID2	0.862	0.240			
	LID1	0.763	0.448			
Insentif Modal Kerja	CIN4	0.854	0.202	0.941	0.925	0.914
	CIN3	0.888	0.203			
	CIN2	0.795	0.315			

	CIN1	0.879	0.22 1			
Partisipasi Pemerintah	GPI4	0.843	0.23 2	1.105	0.905	0.901
	GPI3	0.880	0.19 8			
	GPI2	0.782	0.29 7			
	GPI1	0.746	0.37 8			
Penundaan Beban Hutang	DDE4	0.856	0.22 3	0.979	0.922	0.884
	DDE3	0.844	0.21 3			
	DDE2	0.856	0.24 8			
	DDE1	0.840	0.29 5			

Sumber: *Output SPSS (2020)*

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model, suatu variabel ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Pengujian dilakukan dengan cara melihat nilai skewness dan kurtosis, apabila nilai statistik dalam skewness dan kurtosis data berada dalam rentang ± 2 pada tingkat signifikansi 0.01 (George & Mallery, 2010). Hasil analisis data menunjukan (Tabel 1), nilai satistik skewness ada pada rentang -0,142 sampai dengan 0,736 sedangkan nilai statistik kurtosis ada pada rentang -0,241 sampai dengan 1,136. Dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang terdistribusi normal.

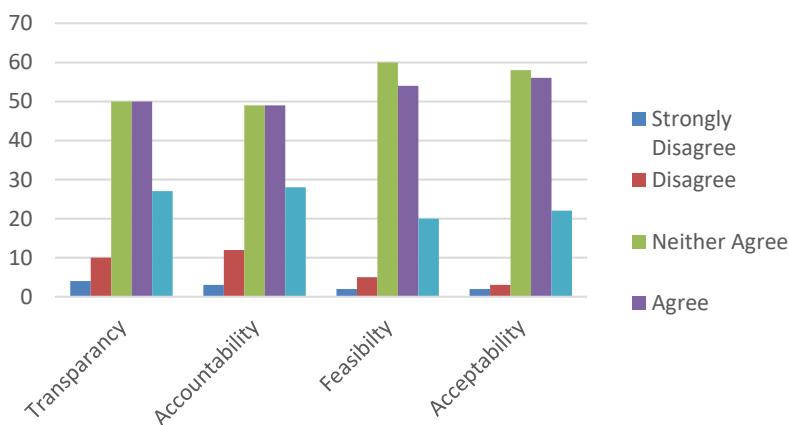
Tabel 5
Uji Normalitas Data

	<i>N</i>	<i>Mean</i>		<i>Std. Deviation</i>	<i>Varian ce</i>	<i>Skewness</i>		<i>Kurtosis</i>	
		<i>Statist ic</i>	<i>Statist ic</i>	<i>Std. Errro r</i>	<i>Statistic</i>	<i>Statisti c</i>	<i>Statist ic</i>	<i>Std. Errro r</i>	<i>Statist ic</i>
TRE1	141	3.61	.082	.969	.940	-.387	.204	-.011	.406
TRE2	141	3.62	.082	.969	.938	-.313	.204	-.241	.406
TRE3	141	3.60	.070	.827	.684	-.142	.204	.286	.406
TRE4	141	3.66	.069	.818	.669	-.169	.204	.359	.406
LID1	141	3.52	.088	1.039	1.080	-.474	.204	-.050	.406
LID2	141	3.60	.082	.971	.943	-.488	.204	.209	.406
LID3	141	3.60	.077	.918	.843	-.568	.204	.669	.406
LID4	141	3.55	.073	.865	.749	-.736	.204	1.136	.406
CIN1	141	3.64	.083	.988	.975	-.618	.204	.403	.406
CIN2	141	3.72	.078	.928	.862	-.436	.204	-.112	.406
CIN3	141	3.73	.083	.985	.970	-.709	.204	.434	.406
CIN4	141	3.67	.073	.867	.752	-.227	.204	.066	.406
DDE1	141	3.50	.085	1.004	1.009	-.569	.204	.162	.406
DDE2	141	3.48	.082	.968	.937	-.572	.204	.224	.406
DDE3	141	3.63	.073	.865	.749	-.480	.204	.239	.406
DDE4	141	3.62	.077	.915	.838	-.522	.204	.449	.406
GPI1	141	3.65	.078	.927	.859	-.489	.204	.135	.406
GPI2	141	3.60	.074	.877	.770	-.287	.204	.030	.406
GPI3	141	3.60	.079	.940	.884	-.381	.204	-.051	.406
GPI4	141	3.51	.076	.899	.809	-.241	.204	-.185	.406
Valid N (listwises)	141								

Sumber: Output SPSS (2020)

Hasil tanggapan responden terhadap kebijakan tax reduction (lihat tabel 6): pada aspek transparency, index

menunjukkan implementasi kebijakan ada pada tingkat sedang yaitu 72.2 persen. Pada aspek accountability, index menunjukkan implementasi kebijakan ada pada tingkat sedang yaitu 72.3 per cent. Pada aspek feasibility index menunjukkan implementasi kebijakan ada pada tingkat sedang yaitu 72.1 persen. Sedangkan pada aspek acceptability, index menunjukkan presentase 73.2 persen ada pada tingkat sedang. Rata-rata secara keseluruhan implementasi tax reduction policy menurut pengusaha UMKM, index menunjukkan kriteria sedang dengan prosentase 72.4 persen.



Gambar 11
Grafik Implementasi Pengurangan dan Penundaan Pajak

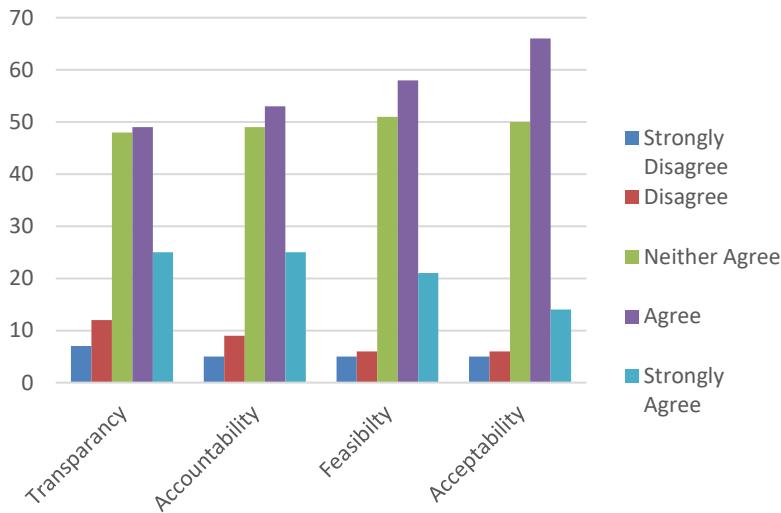
Table 6
Indeks Implementasi Pengurangan dan Penundaan Pajak

Indicators	Score					Total	Index	Conclusion
	1	2	3	4	5			
Transparancy	4	10	50	50	27	509	72.2%	Sedang
Accountability	3	12	49	49	28	510	72.3%	Sedang
Feasibility	2	5	60	54	20	508	72.1%	Sedang
Acceptability	2	3	58	56	22	516	73.2%	Sedang
Average Index						72.4%	Sedang	

Source: Output penelitian, 2020

Hasil tanggapan responden terhadap kebijakan low interest debt (lihat tabel 7): pada aspek transparancy, index menunjukan implementasi kebijakan ada pada tingkat sedang yaitu 70.4 persen. Pada aspek accountability, index menunjukan implementasi kebijakan ada pada tingkat sedang yaitu 71.9 per cent. Pada aspek feasibility index menunjukan implementasi kebijakan ada pada tingkat sedang yaitu 71.9 persen. Sedangkan pada aspek acceptability, index menunjukan presentase 71.1 persen ada pada tingkat sedang. Rata-rata secara keseluruhan implementasi kebijakan low interest debt menurut pengusaha UMKM, index menunjukan kriteria sedang

dengan prosentase 71.3 persen.



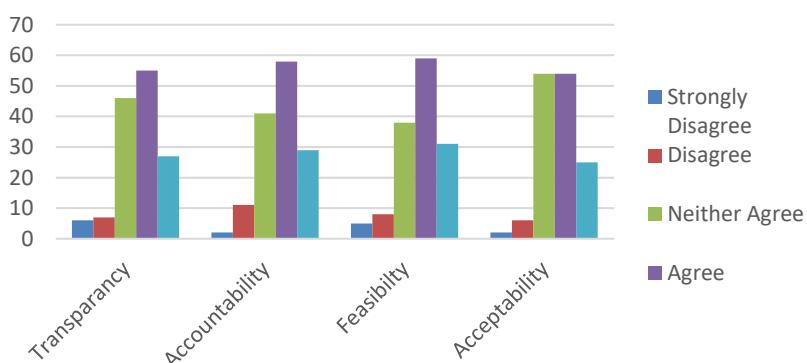
Gambar 12
Grafik Implementasi Hutang Modal Kerja Bunga Rendah

Tabel 7
Indeks Implementasi Hutang Modal Kerja Bunga Rendah

Indicators	Score					Total	Index	Conclusion
	1	2	3	4	5			
Transparency	7	12	48	49	25	496	70.4%	Sedang
Accountability	5	9	49	53	25	507	71.9%	Sedang
Feasibility	5	6	51	58	21	507	71.9%	Sedang
Acceptability	5	6	50	66	14	501	71.1%	Sedang
Average Index						71.3%		Sedang

Source: Output penelitian, 2020

Hasil tanggapan responden terhadap kebijakan capital incentive (lihat tabel 8): pada aspek transparency, index menunjukkan implementasi kebijakan ada pada tingkat sedang yaitu 72.8 persen. Pada aspek accountability, index menunjukkan implementasi kebijakan ada pada tingkat sedang yaitu 74.3 persen. Pada aspek feasibility index menunjukkan implementasi kebijakan ada pada tingkat sedang yaitu 74.6 persen. Sedangkan pada aspek acceptability, index menunjukkan presentase 73.3 persen ada pada tingkat sedang. Rata-rata secara keseluruhan implementasi kebijakan capital incentive menurut pengusaha UMKM, index menunjukkan kriteria sedang dengan prosentase 73.8 persen



Gambar 13

Grafik Implementasi Insentif Modal Kerja bagi UMKM

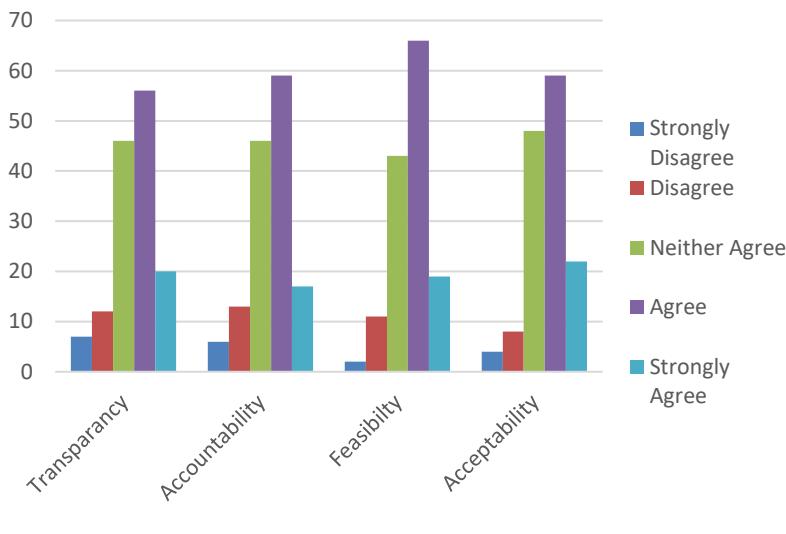
Tabel 8
Indeks Implementasi Insentif Modal Kerja bagi
UMKM

Indicators	Score					Total	Index	Conclusion
	1	2	3	4	5			
Transparency	6	7	46	55	27	513	72.8%	Sedang
Accountability	2	11	41	58	29	524	74.3%	Sedang
Feasibility	5	8	38	59	31	526	74.6%	Sedang
Acceptability	2	6	54	54	25	517	73.3%	Sedang
Average Index							73.8%	Sedang

Source: Output penelitian, 2020

Hasil tanggapan responden terhadap kebijakan debt delay (see table 9): pada aspek transparency, index menunjukan implementasi kebijakan ada pada tingkat sedang yaitu 69.9 persen. Pada aspek accountability, index menunjukan implementasi kebijakan ada pada tingkat sedang yaitu 69.6 persen. Pada aspek feasibility index menunjukan implementasi kebijakan ada pada tingkat

sedang yaitu 72.6 persen. Sedangkan pada aspek acceptability, index menunjukkan presentase 72.3 persen ada pada tingkat sedang. Rata-rata secara keseluruhan implementasi kebijakan debt delay menurut pengusaha UMKM, index menunjukkan kriteria sedang dengan prosentase 71.1 persen.



Gambar 14
Grafik Implementasi Penundaan Pajak

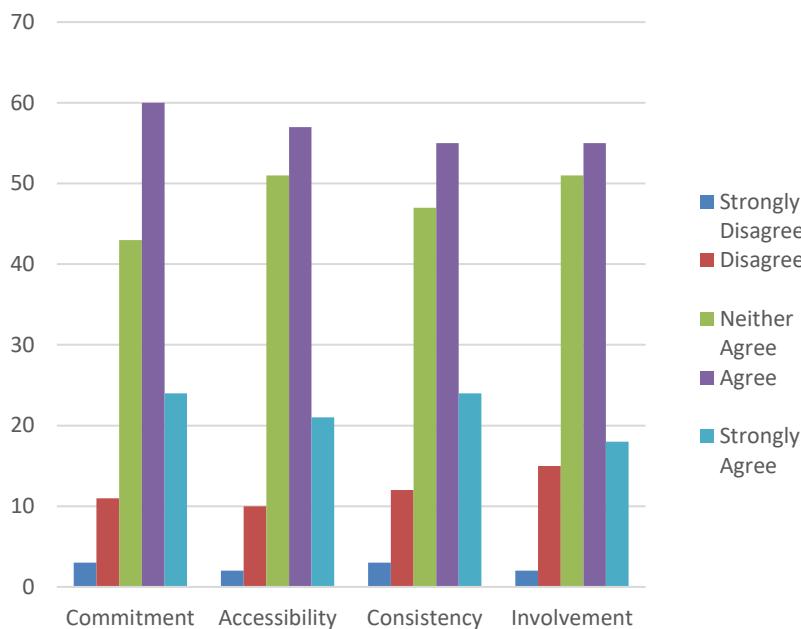
Tabel 9
Indeks Implementasi Penundaan Pajak

Indicators	Score					Total	Index	Conclusion
	1	2	3	4	5			
Transparancy	7	12	46	56	20	493	69.9%	Sedang
Accountability	6	13	46	59	17	491	69.6%	Sedang
Feasibility	2	11	43	66	19	512	72.6%	Sedang
Acceptability	4	8	48	59	22	510	72.3%	Sedang
Averrage Index							71.1%	Sedang

Source: Output penelitian, 2020

Hasil tanggapan responden terhadap local governance participation (lihat tabel 10): pada aspek komitmen, index menunjukkan implementasi kebijakan ada pada tingkat sedang yaitu 72.9 persen. Pada aspek accessibility, index menunjukkan implementasi kebijakan ada pada tingkat sedang yaitu 72.1 persen. Pada aspek consistency index menunjukkan implementasi kebijakan ada pada tingkat

sedang yaitu 72.1 persen. Sedangkan pada aspek involvement, index menunjukkan persentase 70.2 persen ada pada tingkat sedang. Rata-rata secara keseluruhan implementasi kebijakan debt delay menurut pengusaha UMKM, index menunjukkan kriteria sedang dengan persentase 71.8 persen.



Gambar 15
Grafik Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi
Kebijakan UMKM

Tabel 10
Indeks Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi
Kebijakan UMKM

Indicators	Score					Total	Index	Conclusion
	1	2	3	4	5			
Commitment	3	11	43	60	24	514	72.9%	Sedang
Accessibility	2	10	51	57	21	508	72.1%	Sedang
Consistency	3	12	47	55	24	508	72.1%	Sedang
Involvement	2	15	51	55	18	495	70.2%	Sedang
Average Index							71.8%	Sedang

Source: Output penelitian, 2020

BAB VI

KELEMBAGAAN DAN IMPLEMENTASI VISI MISI

“

Dalam upaya memaksimalkan kepemimpinannya, setiap Kepala Daerah harus memiliki Visi dan Misi yang mampu digambarkan dengan baik menjadi kebijakan. Salah satunya adalah lahirnya kebijakan Jogo Tonggo yang di dasarkan pada lokalitas di Jawa Tengah,” ucap salah satu Informan.

Pemimpin yang efektif kelihatannya tidak mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan mereka yang tidak efektif sehingga para ahli perilaku management tidak lagi meneliti tentang apa persyaratan seorang pemimpin yang efektif melainkan peneliti melihat tentang hal-hal yang dilakukan oleh pemimpin yang efektif. Bagaimana mereka mendeklegasikan tugas, bagaimana mereka mengambil keputusan, bagaimana mereka berkomunikasi dan memotivasi para bawahan bahwa seorang kepala

daerah/pemimpin memang harus memiliki standar tertentu namun disamping itu ada suatu cara terbaik untuk memimpin tidak seperti kualitas pemimpin, maka perilaku pemimpin merupakan sesuatu yang dapat dipelajari, jadi seseorang yang dilatih dengan kepemimpinan yang tepat akan bisa menjadi pemimpin yang efektif.

Kepemimpinan kepala daerah dalam hal ini adalah Gubernur Jawa Tengah dilihat merupakan pemimpin yang mampu menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Pemberitaan serta managemen kepemimpinan yang baik mengarahkan kepala daerah memiliki citra yang positif di mata masyarakat yang dipimpin. Salah satu bentu model kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah terletak pada aspek kelembagaanya. Terlembaganya regulasi dalam upaya penanggulangan COVID-19 pada adaptasi kebiasaan baru menjelaskan bahwa Visi Misi Gubernur dalam penanggulangan pandemic dijalankan pula dengan baik oleh pejabat terkait dibawah pemerintah Provinsi.

Masalah yang dihadapi oleh seorang pemimpin terikat pada suatu tempat, situasi, orang dan waktu tertentu.

Masalah dalam pengambilan keputusan senantiasa dihubungkan dengan tujuan yang jelas. Jenis-jenis masalah yang dihadapi oleh seorang pemimpin berdasarkan internitas masalahnya dapat digolongkan menjadi masalah yang sederhana dan masalah yang komplek.

Masalah yang sederhana ialah masalah yang mengandung ciri-ciri: kecil, berdiri sendiri dan tidak/kurang mempunyai kaitan dengan masalah lain. Pemecahannya biasanya tidak memerlukan pemikiran yang luas tetapi cukup dilakukan secara individual, yang umumnya didasarkan kepada pengalaman, informasi yang sederhana dan wewenang yang melekat pada jabatan.

Kemampuan kepala daerah dalam melakukan tindakan serta kerjanya menangani pandemic secara tidak langsung berdampak juga pada posisi Gubernur Jawa Tengah pada elektabilitas politiknya. Menurut salah satu lembaga Survey yang dilakukan 9 Juni di Kompas TV menjelaskan bahwa,:

“ cara-cara mereka menampilkan diri itu secara tidak langsung memberikan gambaran penilaian atas kinerja

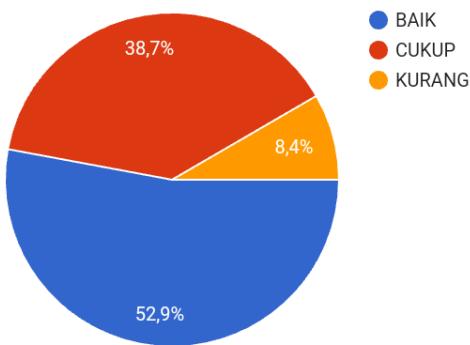
kepala daerah menanggulangi COVID-19, ada unsur kredit posisi yang diambil dari sampel penelitian saat pilpres kemaren memiliki kesinambungan pada saat pilpres dan masalah pilgub DKI. Sekarang ini tidak ada indikator lain dalam menyelesaikan kasus Corona ini..” (hasil transkip narasi Kompas TV 9 Juni 2020)

Mitigasi bencana yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah dalam menanggulangi dampak corona ini juga terlihat pada saat survey nasional tentang elektabilitas Gubenur di beberapa wilayah Indonesia mengalami kenaikan, salah satunya Jawa Tengah. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, menyampaikan dalam survey yang sama juga menjelaskan, “pertama terkait dukungan yang terjadi di sebabkan oleh aktor politiknya tentang kepuasaan masyarakat terhadap aktor, sedang yang kedua percaya pada institusi demokrasi dalam hal ini kelembagaannya dan kepercayaan publik ” (hasil transkrip narasi Kompas TV 9 Juni 2020)

Pemimpin dan kepemimpinan yang di lakukan oleh setia kepala daerah ternyata memberikan dampak yang positif bagi ruang kendali demokrasi dimana masyarakat merasa puas dengan kinerja pemimpin daerah pada saat menanggulangi pandemi COVID-19 ini sehingga apa yang

dilakukan berdampak pada kenaikan elektabilitasnya meskipun disisi lain COVID-19 memberikan dampak negatif pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap bidang-bidang ekonomi. Melihat fenomena yang terjadi, peneliti melihat repson kepemimpinan ini dalam survey opini publik yang ada di Jawa Tengah.

Bagaimana Kepemimpinan
Gubernur Jateng dalam
Menanggulangi Covid-19 ?



Gambar 17 Respon Kepemimpinan

Berdasarkan hasil yang ada tentang kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah dalam menanggulangi Covid-19 mendapatkan respon 52,9 persen baik, 38,7 persen cukup

dan 8,4 persen kurang. Ganjar Pranowo mempunyai gaya kepemimpinan dalam menjalani tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Berbicara mengenai kepemimpinan akan selalu menjadi topik yang menarik, dikarenakan setiap pemimpin mempunyai gaya kepemimpinannya sendiri. Kepemimpinan yang baik berfungsi untuk mendesain dan membentuk organisasi sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain untuk mewujudkan tujuan organisasi. (Terry, 1972). Pendapat lain mengatakan, kepemimpinan juga merupakan kemampuan dalam memberikan pengaruh satu arah, karena pemimpin dapat memiliki beberapa kualitas tertentu yang membuatnya menjadi berbeda dengan pengikutnya. (Moejiono, 2002). Penilaian baik yang ada dalam survey ini juga ditemukan peneliti saat melakukan wawancara dengan salah satu responden yang juga menjadi informan bahwa,

" pak Ganjar niku sae tiyang e, seneng dolan marang wong cilik, pas wonten corona niku ya nggeh dolan sambangi tiyang

cilik nanglet pripun mbah sampun dhahar mboten, mpun mboten sisah tindak-tindak”

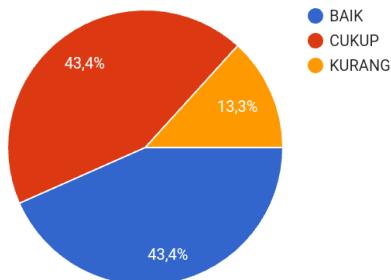
“ Pak Ganjar itu orang baik, suka jalan-jalan ketemu orang kecil, pada saat corona ya datang melihat bertanya bagaimana kabarnya sudah makan belum dan jangan pergi-pergi dahulu”

Sehingga secara garis besar kepemimpinan adalah aktivitas atau kemampuan seseorang yang memiliki kualitas tertentu dalam mempengaruhi orang lain agar dapat melakukan sesuatu sesuai dengan tujuannya. Adapun Ganjar Pranowo mempunyai gaya kepemimpinan transformasional dalam menghadapi wabah ini, yaitu dengan mengandalkan perpaduan cara tradisional dan ilmu teknologi dalam mengatasi wabah Covid-19 di Jawa Tengah.

Ganjar Pranowo melakukan cara tradisional tersebut yaitu dengan melakukan *door to door* dengan melakukan sosialisasi langsung dengan masyarakat luas terkait pencegahan wabah Covid-19. Langkah tersebut dinilai efektif dikarenakan langsung berkomunikasi secara intens dengan kepala desa di seluruh Jawa Tengah. Sebagai pemimpin yang menghadapi krisis, tujuan

komunikasi terpenting adalah melakukan pembagian informasi penting tentang masalah dan bahaya spesifik yang dihadapi masyarakat. Memberikan kepastian dan mengatakan apa yang telah dilakukan. Memberikan fakta konkret dan meyakinkan masyarakat bahwa pihak berwenang melakukan segala kemungkinan untuk mengumpulkan informasi yang dapat diandalkan dan diinformasikan segera setelah informasi terkumpul. Dalam menjalankan fungsinya Gubernur juga diharapkan mampu mengorganisasi para pemimpin di daerah untuk dapat menyamanakan visi serta misinya dalam menanggulangi Covid-19.

Bagaimana Gubernur
Mengorganisasikan pimpinan di tiap
daerah dalam program
penggulangan Covid-19 ?



Gambar 18 Tingkat Organisasi Kelembagaan

Respon masyarakat setelah memberikan penilaian yang baik bagi Gubernur Jawa Tengah dilanjutkan dengan memberikan gambaran tentang kepemimpinan Gubernur dalam mengorganisir kepentingannya pada penanggulangan corona pada tiap-tiap kepala daerah. Masyarakat menilai bahwa Gubernur sudah cukup baik dalam melembagakan kebijakan kemudian mengorganisasinya pada daerah kota / kabupaten di Jawa Tengah. Terdapat 43,4 persen responden menilai baik, sedangkan 43,4 persen menilai cukup dan 13,3 persen menilai kurang.

Sikap ini ditunjang pada saat Gubernur memberikan respon yang cepat dan sigap pada kemunculan awal corona di Indonesia. Dibuktikan dengan adanya video conference Gubernur dengan seluruh kepala daerah di jawa Tengah dalam menanggulangi dampak ke depan Covid-19. Hasil yang ada menunjukkan bahwa responden yang mewakili masyarakat Jawa Tengah sudah mengetahui program dan ikut berpartisipasi dalam memantau kebijakan yang dilakukan pemimpin Jawa Tengah.

Antisipasi Penularan Covid-19, Gubernur Jateng Adakan Video Conference

⌚ Kamis, 19 Mar 2020 09:05:10 ⚡ 550



Keterangan Gambar :

Gambar 19 Foto Kordinasi Gubernur dengan Kepala Daerah

Tindakan atas respon yang terjadi dalam upaya menanggulangi dampak COVID-19 ini ditunjukkan langsung oleh Gubernur dengan melakukn kordinasi secara langsung. Video Conference dalam rangka antisipasi penularan COVID-19 di Jawa Tengah menjadi model kepemimpinan Gubernur yang transformasional dengan mengambil keputusan cepat untuk mengatasi masalah. Pengambilan keputusan antara lain juga diartikan sebagai

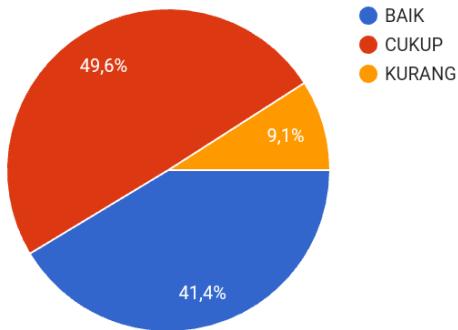
suatu teknik memecahkan suatu masalah dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ada 7 langkah yang perlu diambil dalam usaha memecahkan masalah dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah. Langkah-langkah itu adalah (Siagian SP, 1973)

1. Mengetahui hakekat dari pada masalah yang dihadapi, dengan perkataan lain mendefinisikan masalah yang dihadapi itu dengan setepat-tepatnya;
2. Mengumpulkan fakta dan data yang relevant
3. Mengolah fakta dan data tersebut;
4. Menentukan beberapa alternatif yang mungkin ditempuh;
5. Memilih cara pemecahan dari alternatif-alternatif yang telah diolah dengan matang;
6. Memutuskan tindakan apa yang hendak dilakukan
7. Menilai hasil-hasil yang diperoleh sebagai akibat daripada keputusan yang telah diambil.

Ketujuh langkah tersebut seolah-olah mudah untuk diambil, akan tetapi dalam kenyataannya yang telah dilakukan oleh pemimpin dalam rangka menunjang kepemimpinannya pada pengambilan ketujuh langkah itu tidaklah mudah. Implikasinya ialah setiap pimpinan harus terus berusaha untuk meningkatkan kemampuannya

mempergunakan teknik-teknik ilmiah dimaksud. Di sisi lain pemimpin harus mampu memberikan kebijakan yang nantinya disesuaikan dengan kemampuan daerah mengelola daerahnya sendiri agar tidak menimbulkan problem yang berkepanjangan. Setelah melihat kordinasi yang dilakukan, peneliti melihat sikap yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah dalam menginisiasi regulasi penanggulangan COVID-19 ini. Ada beberapa mekanisme pembuatan kebijakan yang merupakan hasil turunan kebijakan pusat dan ada pula kebijakan internal yang dibuat langsung oleh Gubernur.

Bagaimana Gubernur Jawa Tengah
menginisiasi regulasi
penanggulangan Covid-19 ?



Gambar 20 Inisiatif Kepala Daerah

Sejalan dengan hasil yang ada, responden menilai kepemimpinan Gubernur dalam menginisiasi regulasi penanggulangan COVID-19 ini cukup baik dengan tingkat penerimaan 41,4 persen baik, cukup dengan 49,6 persen dan mendapatkan respon kurang 9,1 persen. Tingkat penerimaan pada level ini menunjukkan bahwa kepala daerah sudah menginisiasi kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Ini dibuktikan dari adanya kebijakan *Jogo Tonggo* yang diinisiasi berdasarkan nilai-nilai lokalitas masyarakat Jawa

Tengah. Menurut salah satu warga yang berada di Mangkang Kulon Kota Semarang menyebutkan bahwa,

“ di Semarang ini awal mulanya kasus corona ini sedikit tiba tiba melonjak drastis, karena warga masyarakat itu merasa sok kuat dan abai pada penerapan protokol kesehatan, jadi mau gak mau kita ngikutin apa kata pemerintah, ya Jogo Tonggo ini yang bisa dimaksimalkan untuk saling menjaga,”

Konsep gerakan *Jogo Tonggo* adalah konsep percepatan penanganan *pageblug* (bencana) pandemi Covid-19 berbasis masyarakat yang ditetapkan di Jawa Tengah. *Jogo* merupakan frase dalam bahasa Jawa yang berarti jaga atau menjaga, dan *tonggo* berarti tetangga, maknanya adalah saling menjaga tetangga.

Pertimbangan bahwa masyarakatlah yang berhadapan langsung dengan penularan COVID-19, sehingga pencegahannya harus menempatkan mereka sebagai garda terdepan bersama pemerintah yang selalu mendukung. Konsep dilaksanakan pada tingkat Rukun Warga (RW) yang melibatkan masyarakat secara langsung untuk saling menjaga tetangga yang terdampak wabah, terpapar virus corona, dan secara langsung terdampak

secara ekonomi. Pada beberapa kabupaten dan kota, *Jogo Tonggo* menjadi alternatif pilihan sebelum kebijakan PSBB diterapkan, karena ini akan berdampak lebih rumit.

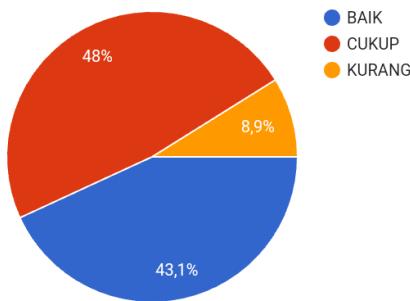
Efektivitas kepemimpinan transformasional terjadi karena pemimpin melihat dirinya sebagai agen perubahan (*agent of change*); pemimpin memiliki visi yang kuat (*visionary*) yang mempunyai level kepercayaan yang tinggi bagi institusinya. Tindakan inilah yang diambil Gubernur Jawa Tengah sebagai pemimpin adalah pengambil resiko, tetapi bukan orang yang sembrono. Kemampuan pemimpin yang memiliki sikap kapabel mengartikulasikan nilai-nilai inti yang cenderung untuk memandu perilakunya.

Selain itu pemimpin memiliki keterampilan kognitif yang luar biasa dan keyakinan dalam mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil suatu tindakan; pemimpin percaya dengan orang dan menunjukkan sensitifitas terhadap kebutuhan orang; pemimpin fleksibel dan terbuka untuk belajar dari pengalaman.

Silalahi (2011) juga meyakini bahwa kepemimpinan transformasional merupakan model kepemimpinan yang

memiliki keunggulan dalam memulihkan, memelihara dan membangun kepercayaan publik kepada pemerintah. Sehingga kepemimpinan transformasional lebih cocok bagi model kepemimpinan sektor publik. Sehingga apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah dengan mengakomodir kebijakan yang disesuaikan dengan visi kedepan membenahi permasalahan publik sudah pada tindakan yang tepat.

Bagaimana Gubernur Jawa Tengah melaksanakan managemen organisasi secara Struktural dalam penanggulangan Covid-19 ?



Gambar 21 Managemen Organisasi Struktural

Menginisiasi kebijakan membutuhkan tindak lanjut yang disesuaikan dengan penurunan jumlah kasus COVID-19 di Jawa Tengah. Hasil yang ada menunjukkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat 43,1 persen mengatakan baik, 48 persen mengatakan cukup serta 8,9 persen mengatakan kurang. Kondisi masyarakat kita saat ini sedang krisis kepercayaan (*distrust*), terjadi degradasi moral bangsa, dibuktikan dengan masih cukup tingginya tingkat kesadaran warga masyarakat yang abai merespon adanya pandemic. Oleh karena itu perilaku yang kurang baik yang berakibat semakin melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik.

Oleh sebab itu dibutuhkan pemimpin yang memiliki visi yang jelas dan kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, mampu membangun kepercayaan diri pengikutnya, mampu menjadi tauladan bagi yang dipimpin, serta mampu mentransfer ide-ide perubahan kepada anggota organisasi yang dipimpinnya sehingga mau melakukan kegiatan untuk mencapai visi tersebut. Untuk itu pemimpin transformasional sangat relevan dan dibutuhkan dalam kondisi masyarakat dan bangsa kita pada saat ini.

Kondisi ini nampak pada tindakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah pada dibentuknya badan kordinator wilayah.



Percepat Penanganan Covid-19, Ganjar Pranowo Bentuk 6 Koordinator Wilayah

Rabu, 1 Juli 2020 | 20:46 WIB

Oleh : Stefy Thenu / [JAS](#)



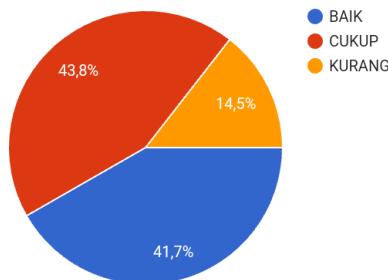
"Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo,"

Gambar 22 Ganjar Memberi Arahan

Pembentukan 6 kordinator wilayah ini di maksudkan untuk mengatasi persioalan-persoalan yang muncul dalam penanganan pandemi di Jawa Tengah. Kondisi ini dilakukan dalam rangka percepatan perbaikan dampak sosial, ekonomi, maupun kesehatan. Beragam tindakan serta

program kerja yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah semakin menunjukkan bahwa peran serta Gubernur dalam menurunkan angka covid-19 di Jawa Tengah cukup baik. Tindakan yang dilakukan ini sejalan dengan hasil yang diperoleh peneliti, bahwa 41,7 persen responden menyatakan bahwa Gubernur telah melaksanakan tugas fungsi pokoknya dengan baik dalam rangka menurunkan angka COVID-19. Meskipun disisi lain masih banyak kekurangan yang ditimbulkan selain dari kebijakan teknis Provinsi Jawa Tengah. Selebihnya responden menilai cukup sebanyak 43,8 persen dan kurang sebesar 14,5 persen.

Bagaimana peran serta Gubernur
Jawa Tengah dan Kepala daerah
Kota/Kabupaten dalam menurunkan
Angka Covid-19 ?



Gambar 23 Peran Serta Kepala Daerah

Kepemimpinan Gubernur dalam mengambil langkah taktis dilakukan oleh semuakepala daerah dalamrangka menurunkan angka Covid-19 terutama di Jawa Tengah. Terlebih beberapa pimpinan daerah tersebut mengambil kebijakan sebelum aturan pusat dibentuk oleh Presiden. Kemampuan Gubernur dalam merespon pandemic ini juga mendapatkan respon baik oleh masyarakat. Kondisi ini dibuktikan dengan dibuatnya beberapa kebijakan yang berfungsi sebagai jaring sosial.

Tribunnews.com ≡

New Normal di Jateng: Ganjar Tak Ingin Terburu-buru, Masih Fokus Turunkan Kurva dan Sosialisasi

Kamis, 28 Mei 2020 18:18 WIB

[!\[\]\(5d19a3b06d93cdbfe8808c4b9dd97388_img.jpg\)](#) [!\[\]\(6ff996dbe704cd681ab00512eb807d8a_img.jpg\)](#) [!\[\]\(be4f70ab27a10afc3131fcbcc087a64d_img.jpg\)](#) [!\[\]\(980f890335d2afb7c038704ecc9d7355_img.jpg\)](#)



Gambar 24 Foto Ganjar Memberi Arahan

Sebagai Pemimpin, strategi komunikasi untuk menyebarluaskan pesan kepada masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah misalnya, menggunakan teknik strategi komunikasi Koersif lebih dominan dibandingkan dengan lainnya. Dengan mengedepankan lokalitas masyarakat Jawa Tengah, hingga akhirnya dapat menemukan kebijakan yang tepat. Meskipun pada saat muncul istilah New Normal, Gubernur Jawa Tengah enggan

untuk melakukan pemberlakuan kebijakan itu dan fokus bagaimana menata kondisi lingkungan sosial disana. Sikap yang diambil pemimpin dalam pemberlakuan kebijakan karena melihat situasi Jawa Tengah beberapa bulan kedepan.

BAB VII

KEPEMIMPINAN DALAM ASPEK MANAGEMEN

“

Sebagai pemimpin dengan menjadi salah satu ujung tombak dalam pengendalian suatu lembaga tentu harus memiliki kemampuan aspirasi yang bisa memberikan perubahan-perubahan serta bisa mengubah pola pikir bawahan untuk bisa selalu berorientasi pada tercapainya visi dan misi melalui managemen

Majunya satu organisasi daerah dipengaruhi oleh bentuk kepemimpinan kepala daerah yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal dan faktor internal. Faktor internal dalam budaya organisasi di lingkungan pemerintah daerah biasanya meliputi pemimpin organisasi, sumber daya manusia, motivasi dan kinerja. Kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala daerah pada

dampak sikap-sikap yang di tonjolkannya. Sebagai pemimpin dengan menjadi salah satu ujung tombak dalam pengendalian suatu lembaga tentu harus memiliki kemampuan aspirasi yang bisa memberikan perubahan-perubahan serta bisa mengubah pola pikir bawahan untuk bisa selalu berorientasi pada tercapainya visi dan misi. Sikap ini ditunjukkan oleh Gubernur Jawa Tengah dalam melakukan fungsinya sebagai pemimpin daerah untuk mengkomunikasikan serta mengagregasikan kebijakan secara terstruktur dan tersistematik.

**Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Dinilai
Cepat Tangani Covid-19**

Adib Auliawan Herlambang
Sabtu, 18 April 2020



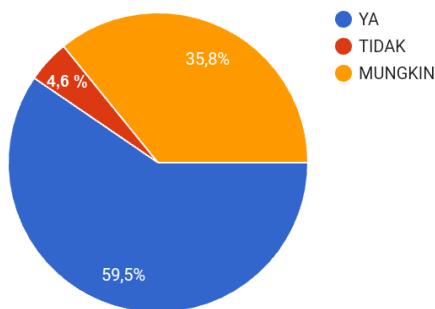
*Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
(Instagram/ganjar_pranowo)*

Gambar 25 Penilaian Gubernur Jateng

Ketrampilan Gubernur Jawa Tengah yang dilakukan dalam rangka penanggulangan COVID-19 ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: ketrampilan interpersonal dan ketrampilan manajemen. *Interpersonal skill* merupakan ketrampilan yang digunakan dalam berinteraksi antara pemimpin dan pengikutnya (bawahan). Sikap ini ditunjukkan pada saat melakukan kordinasi dengan stakeholder dalam rangka penguatan UMKM. Sikap lain yang ditunjukkan oleh

Gubernur Jawa Tengah dengan mengedepankan ketrampilan *interpersonal* pemimpin. Kemampuan ini merupakan hal penting dalam proses penginspirasian orang lain ke arah pengimplementasian visi. Pemimpin yang berhasil secara umum mempunyai ketrampilan interpersonal yang sangat kuat, menghadapi orang lain dengan baik, dan pandai berdiplomasi dan bijaksana. Ketrampilan interpersonal yang lain adalah juga penting untuk dimiliki pemimpin, yaitu ketrampilan mengkomunikasikan visi. Ketrampilan tersebut meliputi ketrampilan: jaringan (*network*), manajemen konflik, dan menilai diri dan orang lain.

Apakah Gubernur Jawa Tengah memberi pengarahan kepada Satgas Penanggulangan Covid-19 dengan baik ?



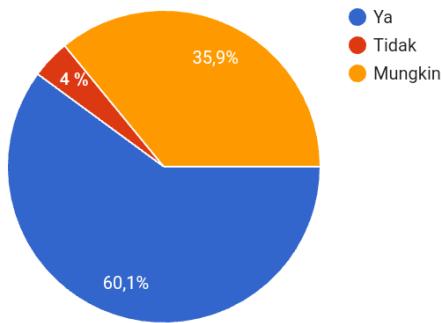
Gambar 26 Tingkat Pengarahan

Kemampuan memimpin di dasarkan pada ketrampilan yang dimiliki Gubernur Jawa Tengah dibuktikan dari hasil respon masyarakat yang mengatakan 59,5 persen bahwa Gubernur memberi pengarahan kepada satgas penanggulangan COVID-19 di Jawa Tengah dan hanya 4,6 persen mengatakan tidak serta 35,8 persen mengatakan mungkin. Selain ketrampilan interpersonal, ketrampilan manajemen juga harus dimiliki oleh pemimpin. Salah satu ketrampilan manajemen adalah ketrampilan

administratif. Ketrampilan administratif adalah penting untuk menjalankan fungsi manajemen yang memfasilitasi aktivitas hari ke hari dari suatu organisasi (Locke et.al.,1991, p. 43).

Ketrampilan tersebut meliputi pemecahan masalah, pengambilan keputusan, penentuan tujuan, dan perencanaan. Keahlian administratif tidak sama dengan gaya manajemen. Keahlian administratif adalah kompetensi yang memberikan pemimpin untuk melaksanakan tugas dengan gaya apapun yang pemimpin pilih (Yukl, 1989, a, 176). Dengan memberikan pengarahan secara baik kepada bawahan melalui ketrampilan yang dimiliki menunjukkan bahwa Gubernur Jawa Tengah memang pemimpin yang transformasional.

Apakah Gubernur Jawa Tengah
merencanakan kebijakan Covid-19
dengan baik ?



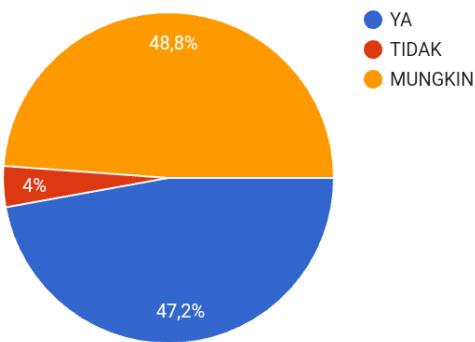
Gambar 27 Perencanaan Kebijakan

Sikap yang ditunjukkan oleh Gubernur Jawa Tengah dalam setiap tindakan serta kebijakan yang dibuat mencerminkan kemampuan dirinya beradaptasi dengan model kepemimpinan yang dilaksanakan. Gubernur dinilai oleh responden sejumlah 60,1 persen dapat merencanakan kebijakan dengan baik, 4 persen menyatakan tidak dan 35,9 menyatakan mungkin. Hasil ini ditunjang pendapat informan yang didapatkan dari hasil wawancara di Bandungan, Kabupaten Semarang bahwa,

“ kami merasakan betul apa yang Gubernur berikan kepada masyarakat kecil kaya kami di pasar Bandungan ini, masih membebaskan untuk tetap berjualan meskipun katanya banyak masyarakat yang positif.” (wawancara narasumber 7 November 2020)

Respon yang ditunjukkan masyarakat ini sejalan dengan sikap yang sudah dibangun oleh pemimpin di daerah dengan mengedepankan sifat-sifat transformative yang mengedepankan lokalitas masyarakat sekitar.

Apakah Gubernur Jawa Tengah
bekerja sama dengan lembaga
sektoral/non-sektoral dengan baik ?

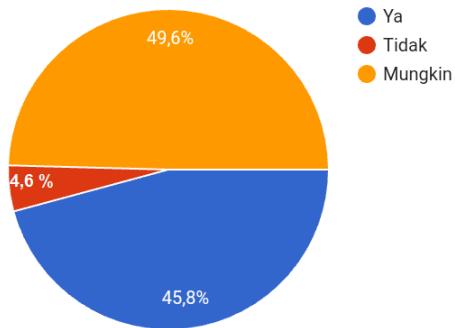


Gambar 28 Kerjasama Non/Sektoral

Hasil lain menunjukkan bahwa Gubernur juga melaksanakan kerjasama lintas sektoral dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Sebanyak 47,2 persen menyatakan ya dan 48,8 persen menyatakan mungkin, dengan 4 persen menyatakan tidak. Dari hasil yang ada ini masih diperlukan kajian lebih mendalam tentang model kerjasama yang dilakukan oleh pemimpin daerah.

Meskipun memiliki motif dan sifat belum dengan sendirinya membuat pemimpin efektif. Motif dan sifat dapat membantu individu memperoleh pengetahuan dan ketrampilan untuk memformulasikan visi pemimpin dan mengimplementasikan. Kemampuan (*ability*), khususnya kemampuan kognitif memainkan peran penting dalam Kepemimpinan. Selain itu Karisma akan nampak ketika pemimpin berkomunikasi, khususnya ketika pemimpin sedang memberikan kata-kata yang inspiratif untuk mendorong bawahan.

Apakah Gubernur Jawa Tengah
melakukan pengendalian kebijakan
secara berkala ?



Gambar 29 Monitoring Kebijakan

Setiap kebijakan yang dibuat, Gubernur Jawa Tengah melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang dijalankan. Dalam penelitian yang ada 45,8 persen responden menyatakan ya, bahwa Gubernur melakukan pengendalian kebijakan secara berkala. Sedangkan 49,6 persen menyatakan mungkin melakukan dan 4,6 persen tidak melakukan. Kondisi ini di perkuat dengan kepemimpinan Gubernur yang secara tidak langsung turun langsung memantau daerah menggunakan kendaraan motor.

Perilaku ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak bisa dilepaskan dari adanya karisma pemimpin daerah.

[Home](#) / [Batang Raya](#) / [Batang](#)

Pencegahan Covid-19 Dinilai Inspiratif, Gubernur Jateng Sambangi Desa Pacet Naik Motor

⌚ Minggu, 05 April 2020 ⚖️ Abdul Arif



Ganjar Pranowo Naik Sepeda Motor mengunjungi Desa Pacet yang melakukan isolasi mandiri, Minggu (5/4/2020). (Muslihun/Kontributor Batang)

Gambar 30 Kunjungan Gubernur ke Lokasi

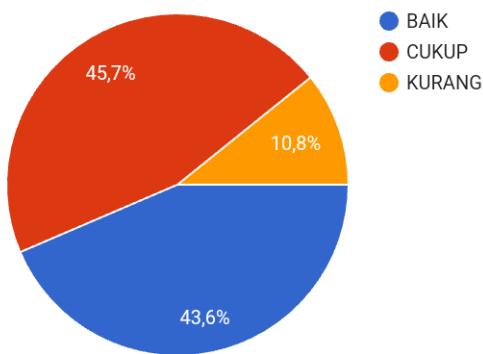
Karisma diartikan sebagai *leader's perceived God-like qualities* yang menciptakan *referent power* dan *influence* (Bass, 1985). Inspirasi adalah kemampuan untuk menarik,

mengajak dan secara emosional mengkomunikasikan ididealisme masa depan. Pemimpin memancarkan *power* dan memengaruhi pengikut melalui cara yang *visioner*. (Bass, 1985). Pertimbangan individual menggambarkan bagaimana pemimpin memperoleh *power*, baik melalui pelayanan maupun kepenasihat dan pengembangan orientasi pengikut (Bass, 1985). Stimulasi intelektual mendorong pengikut untuk berpikir dengan cara baru terhadap masalah-masalah lama (*think of old problems in new ways*), mendorong mereka mempertanyakan nilai-nilai dan keyakinan yang dimilikinya dan apakah sesuai dengan pemimpinnya (Bass *et al.*, 1987).

Berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh pemimpin daerah, Gubernur Jawa Tengah juga memiliki ketegasan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ketegasan merupakan salah satu kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Hal ini dijelaskan oleh Suggerman, Scullard dan Wilhelm (2011) bahwa ketegasan ini sangat erat kaitannya dengan penggambaran kepercayaan diri seorang pemimpin. Pemimpin yang tegas dipersepsikan memiliki kepercayaan diri yang baik. Kondisi ini juga berpengaruh

terhadap bagaimana para pengikutnya melihat kemampuan seorang pemimpin didalam mengambil suatu keputusan terhadap satu permasalahan.

Bagaimana Gubernur Jawa Tengah melakukan tindakan atas perubahan situasi pada saat penanggulangan Covid-19 ?



Gambar 31 Quality Control

Masyarakat melihat tindakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah dalam rangka penanggulangan Covid-19 ini cukup baik dengan respon 43,6 persen dan 45,7 mungkin sedangkan 10,8 persen menyatakan kurang. Karena tindak lanjut yang dilakukan oleh pemimpin daerah

bukan hanya ketegasan juga kepedulian terhadap masyarakat yang dipimpin. Perhatian merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.

Gubernur Ganjar Optimalkan Jogo Tonggo dan Operasi Yustisi di Jateng

Afri Rismoko

Kamis, 17 September 2020



Gambar 32 Gubernur Memanfaatkan Jogo Tonggo

Menurut Saros, Coper dan Santora (2005) kepedulian harus menjadi salah satu karakter yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin dan nyata diimplementasikan dalam bentuk perilaku. Perhatian ini digambarkan dengan selalu memperhatikan kesejahteraan yang ada pada anggotanya dalam hal ini pemimpin harus memiliki peran di dalamnya.

BAB VIII

KOMUNIKASI PUBLIK SANG PEMIMPIN

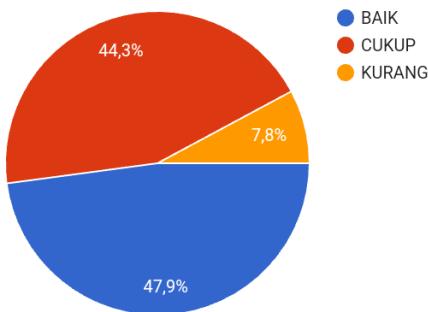
“

Dengan gaya pencitraan yang positif, wajar warga Jawa tengah menilai Ganjar Pranowo cukup baik dalam berkomunikasi menyampaikan penganganan Covid-19 ini, ungkap salah satu warga Salatiga”

Kepemimpinan merupakan kajian yang sangat menarik untuk diteliti, mengingat banyaknya fenomena yang terjadi dalam aspek kepemimpinan, mulai dari karakter, budaya, social dan politik yang mengitarinya. Fenomena kepemimpinan yang terjadi di Indonesia, telah membuktikan tentang bagaimana kepemimpinan memberikan pengaruh yang besar dan kuat terhadap tatanan kehidupan berpolitik dan bernegara. Terutama bagaimana pemimpin berkomunikasi dengan bawahannya dalam upaya pendeklegasian wewenang.

Berdasarkan hasil yang ada menunjukkan respon masyarakat sebesar 47,9 persen mengatakan bahwa Gubernur Jawa Tengah baik , 44,3 persen cukup dan 7,8 persen kurang dalam tindakannya sebagai agen perubahan untuk menginisiasi munculnya kebijakan yang di dasarkan pada nilai-nilai lokal.

Bagaimana Gubernur Jawa Tengah
bertindak sebagai agen perubahan
di daerahnya ?



Gambar 33 Inisiatif Perubahan

Gaya atau model yang ditunjukkan dan ditampilkan oleh pemimpin, dapat dimaknai sebagai suatu sikap, tingkah laku, gerakan, kesanggupan, kecakapan untuk berbuat baik. Gaya kepemimpinan banyak mempengaruhi keberhasilan

seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku bawahannya untuk mencapai suatu tujuan. Seperti yang dilakukan Gubernur dengan mencoba menginisiasi untuk para penyintas dapat bersumbangsih pada negara.

Jumat, 04 Des 2020 21:08 WIB

Ganjar Dorong Penyintas COVID-19 Donorkan Plasma Darah, Begini Caranya

Angling Adhitya Purbaya - detikHealth

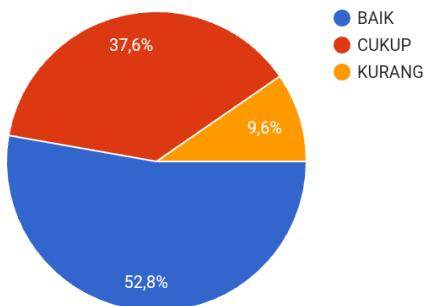


Gambar 34 Program Usulan Gubernur

Menurut Masaong (2011), gaya kepemimpinan yang ditampilkan oleh seorang pemimpin menunjukkan perilaku konsisten yang diterapkan dalam bekerja dengan dan melalui orang lain guna mencapai tujuan bersama. Gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh setiap pemimpin merupakan perilaku yang digunakan pada saat orang

tersebut mencoba mempengaruhi orang lain. (Munajat, 2013). Melalui penciptaan visi, pemimpin mengintegrasikan dan mengarahkan usaha-usaha semua anggota organisasi. Pemimpin efektif mengenali pentingnya visi. Segala sesuatunya, pemimpin harus melakukan sesuai dengan visi atau mendukung visi. Fungsi utama pemimpin adalah menetapkan visi untuk organisasi dan mengkomunikasikan visi dengan cara yang menarik kepada bawahan. Visi didefinisikan sebagai gambaran yang akan datang yang unik dan ideal.

Bagaimana Gubernur Jawa Tengah
memiliki Visi yang kuat dalam
penanggulangan Covid-19 ?



Gambar 35 Visi Perubahan

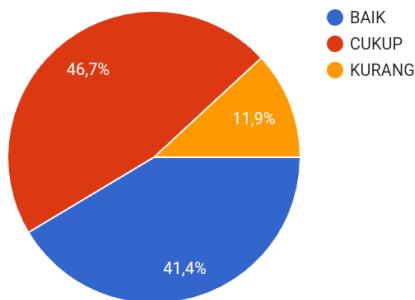
Berdasarkan pemahaman masyarakat, ditunjukkan bahwa Gubernur memiliki Visi yang kuat dalam penanggulangan COVID-19 dengan 52,8 persen baik, 37,6 persen cukup dan 9,6 persen beranggapan kurang. Dalam memimpin daerahnya, tentu saja Gubernur dihadapkan pada perubahan sosial politik yang ada. Sehingga tindakan yang dilakukan akan berdampak pada penanggulangan pandemic secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, untuk menghadapi perubahan-perubahan lingkungan internal dan eksternal yang sulit diramalkan di Jawa Tengah, maka diperlukan pemimpin masa depan yang visioner dan transformatif. Kepemimpinan transformatif dalam hal ini dipahami sebagai suatu aktivitas di mana pemimpin yang memberikan perhatian individual dengan memberikan tugas yang sesuai dengan kompetensi bawahannya, serta mampu menerapkan stimulasi intelektual kepada bawahannya (Septyan et al., 2017).

Dalam upaya penanggulangan COVID-19 nampaknya Gubernur sedikit berhati-hati dalam mengambil resiko dari kebijakan yang dibuatnya. Berdasarkan hasil

yang ada 41,4 persen menyatakan baik, 46,7 persen menyatakan cukup dan 11,9 persen menyatakan kurang. Sebagai seorang pemimpin, memang kadangkala dihadapkan pada problem yang belum bisa di selesaikan segera melainkan perlu adanya kajian mendalam.

Bagaimana Gubernur Jawa Tengah
mengambil resiko atas kebijakan
yang di buat ?



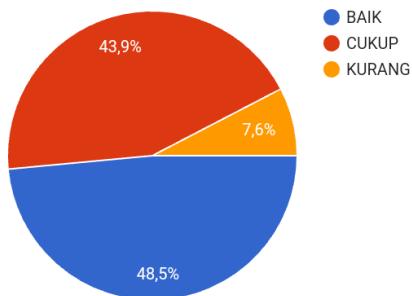
Gambar 36 Inisiatif Pengambilan Resiko

Meningkatkan perubahan dengan menjalankan visi kedepan perlu adanya managemen resiko yang harus dilaksanakan seorang pemimpin. Ini merupakan kategori terakhir dalam implementasi visi. Pemimpin yang efektif berinisiatif dan melakukan perubahan dan inovasi.

Pekerjaan pemimpin adalah mempersiapkan orang dan organisasi untuk berhubungan dengan menyukai, mengembangkan afektif pada perubahan (Locke et al., 1991, p. 95). Perubahan datang dalam bentuk yang berbeda-beda. Perubahan mungkin berupa: bentuk produk baru, pasar baru, inovasi teknikal atau memperbaiki produk dan jasa yang ada.

Kemampuan pemimpin untuk menciptakan dan mengelola perubahan adalah penting dan krusial tidak hanya untuk mencapai visi tetapi juga untuk keberhasilan dan kelangsungan organisasi. Inovasi harus secara konstan 'diusulkan, diuji, ditolak, dimodifikasi, dan dilakukan' pada organisasi untuk menjadi efektif, karena keberhasilan perusahaan terletak pada kemampuan berinovasi melakukan perubahan. Seperti halnya inovasi kebijakan *Jogo Tonggo* yang dengan kemampuannya pemimpin menangkap itu semua untuk dijadikan kebijakan.

Bagaimana Gubernur Jawa Tengah
menjelaskan nilai-nilai lokal yang
baik dalam kebijakan ?

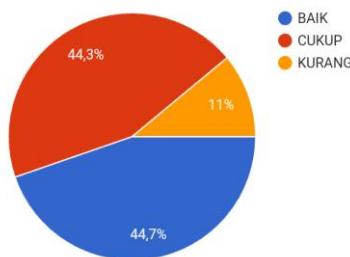


Gambar 37 Inisiatif Lokalitas Kebijakan

Dengan penerapan model kepemimpinan transformasional, maka anggota akan melakukan tugasnya dengan maksimal dikarenakan pemberian tugas dari pemimpin bukanlah suatu beban yang berat. Hal tersebut disebabkan pemimpin dapat mempengaruhi anggotanya sehingga ketika diberikan tugas, anggota dapat menerima dengan senang hati (Senny et al., 2018). Dengan diterapkan kepemimpinan transformasional maka bawahan akan merasa dipercaya, dihargai dan bawahan akan lebih menghargai pimpinanya. Oleh karena itu dalam upaya

penggunaan nilai nilai lokal yang ada, Gubernur Jawa Tengah mendapatkan respon baik sebesar 48,5 persen, cukup dengan 43,9 persen serta kurang 7,6 persen. Untuk merespon kebijakan yang ada Gubernur juga melaksanakan fungsinya sebagai penyambung kebutuhan masyarakat dengan menjalin kerjasama bersama mitra UMKM.

Bagaimana komitmen Gubernur Jawa Tengah menjalin kemitraan dengan dunia usaha dalam adaptasi kebiasaan baru ?



Gambar 38 Komitmen Kemitraan

Hasil yang ada menunjukkan bahwa 44,7 persen dari total responden menyatakan baik , 44,3 persen menyatakan cukup dan 11 persen menyatakan kurang dalam hal komitmen Gubernur dalam menjalin kemitraan dengan dunia usaha pada adaptasi kebiasaan baru. Sebagai buktinya

pemimpin harus memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan visi misinya melalui komitmen tangguh.

Janji Kemudahan Perizinan, Ganjar Pranowo Ajak Investor Investasi di Jateng

Sektor pariwisata dan Usaha Kecil Menengah (UKM) juga perlu diperhitungkan.

Fabiola Febrinastri
Rabu, 11 November 2020 | 15:56 WIB



Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, membuka CJIBF 2020, secara daring, Rabu (11/11/2020). (Dok : Pemprov Jateng)

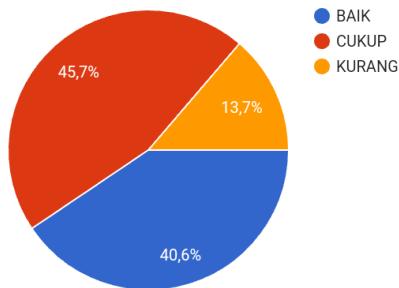
Gambar 39 Gubernur berkomitmen pada Investasi

Masalah yang lebih penting bagi seorang pemimpin transformasional adalah selalu mempunyai visi yang kuat, ini ditunjukkan Gubernur Jawa Tengah pada sebuah gambaran tentang bentuk kebijakannya di masa depan bila semua tujuan-tujuan utamanya telah dicapai (Covey, 1989).

Dengan demikian, seorang pemimpin transformasional juga haruslah seorang yang *visioner* (Chandra, 1997; Huseini, 1997). Esensi kepemimpinan serupa ini adalah mampu menghasilkan perubahan yang mana dirinya dan mereka yang terkait dengannya sama-sama mengalami perubahan ke arah yang lebih luas, lebih tinggi, dan lebih mendalam.

Kata kunci dari segenap keputusannya adalah seberapa jauh sebanyak mungkin pihak mengalami pertumbuhan. Seperti kebijakan menjalin kemitraan dengan dunia usaha supaya masyarakat UMKM yang terdampak segera bangkit kembali. Selain komitmen pada jalinan kemitraan, Gubernur juga memiliki komitmen untuk mengurangi kesenjangan dengan membuka beragam peluang kebijakan.

Bagaimana Gubernur Jawa Tengah
berkomitmen pada pengurangan
kesenjangan di masyarakat saat
adaptasi kebiasaan baru ?



Gambar 40 Komitmen Pada Dampak Sosial

Berbicara tentang komitmen Gubernur pada pengurangan kesenjangan di masyarakat pada adaptasi kebiasaan baru mendapatkan respon 45,7 persen cukup, 40,6 persen baik serta sisanya 13,7 persen menyatakan kurang. Pemimpin harus mampu menciptakan kesesuaian antara kata dan perbuatan, dan memberi contoh yang lebih bermakna daripada hanya sekedar menyampaikan kata-kata atau verbalisme. Bila seorang pemimpin hanya memerankan diri sebagai anggota, produktifitas dapat menurun. Oleh sebab itu, sebaiknya pemimpin adalah orang yang mampu

membuat rencana, melaksanakan, dan mengadakan kontrol secara serial (berkala). Pendapat ini ditunjang oleh pernyataan Gubernur Jawa Tengah dalam, “

Gaya Kepemimpinan Ganjar Pranowo dalam memerangi Covid-19

Salah satu pemimpin yang daerah yang cukup menjadi sorotan publik pada masa pandemi Covid-19 adalah sosok Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Judolf
Sabtu, 27 Juni 2020 | 14:10 WIB



Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (Antara)

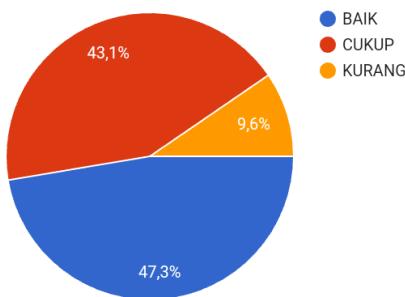
Gambar 41 Gaya Kepemimpinan Ganjar

Implementasinya; secara swadaya disiapkan oleh masyarakat dan lingkungannya melalui kegiatan saling berbagi hasil kebun antar tetangga, saling membantu untuk mencukupi kebutuhan masing-masing keluarga. Hubungan/interaksi sosial dalam lingkungan terdekat masing-masing warga dijalin secara lebih teratur ditengah *social distancing*

yang harus dijalankan. Kemauan setiap anggota masyarakat untuk terlibat memberi solusi terhadap persoalan kelangsungan hidup masyarakat lainnya menjadi hal positif. Jaring pengaman ekonomi, memastikan bahwa tidak ada seorangpun yang kelaparan karena secara ekonomi ia terdampak pandemi.

Terakhir yang dilihat masyarakat berasal dari bagaimana Gubernur Jawa Tengah menginisiasi pelayanan publik pada saat adaptasi kebiasaan baru. Respon yang ada menyebutkan 47,3 persen baik, 43,1 persen menyatakan cukup dan 9,6 persen menyatakan kurang. Ketika *trust* kepada pemimpin daerah telah kuat maka individu dengan rela memberikan bantuannya kepada orang lain, dan begitu sebaliknya, individu tersebut akan mau menggali informasi (pengetahuan) dari orang lain yang dipercayainya.

Bagaimana Gubernur Jawa Tengah
menginisiasi kebijakan pelayanan
publik kepada masyarakat saat
adaptasi kebiasaan baru ?



Gambar 42 Komitmen Perbaikan Layanan

Berdasarkan analisis diatas tentu menjadi bahan evaluasi bagi kita semua bahwa sikap tegas diperlukan dalam situasi seperti ini mengingat bencana ini juga bukan hanya menjadi bencana nasional tetapi juga global. Seluruh dunia bahkan sampai saat ini masih fokus terhadap pencegahan penularan covid-19 agar tidak menyebar secara luas. Strategi komunikasi berupa instruksi, seharusnya terpusat dari satu komando, karena status bencana masuk pada kategori bencana Nasional bahkan global. Seharusnya juga sudah ada pada tindakan sanksi bagi yang

melanggarnya. Sangat disayangkan disaat kondisi seperti ini kita diperlihatkan pada kenyataan, bahwa komando diambil oleh masing-masing pemerintah daerah yang masih sempit lingkup wilayah, yang seharusnya dibarengi oleh tindakan komprehensif dari pemerintah Pusat. Pemerintah pusat bisa melakukan langkah langkah strategis yang tepat dan lebih komprehensif.

BAB PENUTUP

SEKELUMIT CERITA SINGKAT

Berdasarkan temuan yang di dapatkan oleh peneliti di awal dapat menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Jawa Tengah sudah mengetahui regulasi berkaitan dengan COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu juga nampak kepemimpinan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah dalam upaya melembagakan regulasi dengan membuat kebijakan yang di dasarkan pada beberapa kasus terkait dampak sosial politik COVID-19.

Respon masyarakat Jawa Tengah menyatakan bahwa kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo di apresiasi cukup baik. Hasil ini dibuktikan dari penilaian masyarakat selaku responden rata-rata dibawah 15 persen dalam memberikan penilaian kurang dan tidak baik. Selain itu dampak sosial politik yang ada menyebabkan adanya kebijakan-kebijakan UMKM yang dimunculkan juga harus segera di evaluasi keberlanjutannya.

Untuk mengembalikan kepercayaan warga terhadap organisasi sektor publik khususnya birokrasi publik Oleh karena itu dibutuhkan pemimpin yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin transformasional. Dengan model kepemimpinan transformasional tersebut diharapkan pimpinan dapat menjalankan organisasinya lebih baik, lebih menjanjikan, dan lebih dapat menatap masa depan yang lebih cemerlang, meskipun kondisi eksternal organisasi tidak bersahap seperti sekarang ini.

Kepemimpinan transformasional memiliki visi kolektif jelas, memiliki kemampuan mengkomunikasikan secara efektif terhadap seluruh pegawai, melalui berbagai cara, antara lain memberi contoh yang memberi inspirasi bahwa kepentingan organisasi lebih dari kepentingan individual. Dalam kepemimpinan transformasional, para pengikut merasakan kepercayaan, kekaguman, kesetiaan dan penghormatan terhadap pemimpin, dan mereka termotivasi untuk melakukan pekerjaan lebih produktif dari yang direncanakan diawal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianita, O., 2020. Dorong Pemberdayaan SDM Daerah,Kemendag Siapkan Program Inkubasi Pemasaran Daring UMKM, Jakarta: Biro Humas Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Allaire, Yvan and Mihaela E. Firsirotu. 1984. Theories of Organizational Culture. *Organization Studies*, 5/3: 193-226. *Academy of Management Review*. Vol 22, No. 1: 80-109.
- Anggita Doramia Lumbanraja, (2020) Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui *E-Government* Pada *New Normal* dan Reformasi Regulasi Birokrasi, *Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 2, June 2020*
- Ashari, Edy Topo. 2010. Reformasi Pengelolaan SDM Aparatur, Prasyarat Tata Kelola Birokrasi Yang Baik. *Jurnal Borneo Administrator* (6)2.
- Bahtiar, R. A. & Saragih, J. P., 2020. Dampak COVID-19 Terhadap
- Dinkop UKM., 2020. PPID Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Koa Semarang. <http://diskopumkm.semarangkota.go.id>
- Dwiyanto, Agus. 2013. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Evans, M. A, & Campos, A. (2013). Open Government Initiatives: Challenges of Citizen Participation. *Journal of Policy Analysis and Management*, 32(1), 172–185.
- Fernanda, Desi. 2006. Paradigma *New Public Management* (NPM) Sebagai Kerangka Reformasi Birokrasi Menuju

- Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) di Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator* 2(3).
- Ferdinand, A. (2002). *Structural equation modeling dalam penelitian manajemen*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- George, D., & Mallery, P. (2010). *SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference 17.0 Update* (10th Editi). Pearson.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis. In *Vectors* (p. 816).
- Hilgers, D. (2012). Open Government. *Journal of Business Economics*, 82(6), 631– 660.).
- Kadarusman, D. 2012. Natural Intelligence Leadership: Cara Pandang Baru Terhadap Kecerdasa dan Karakter Kepemimpinan. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Kumorotomo, Wahyudi 2007. Citizen Charter (Kontrak Pelayanan): Pola Kemitraan Strategis Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Pelayanan Publik. In *Paper in the seminar of Persadi, Hotel Ibis, Pekanbaru* (Vol. 16) Jonker, J., & Pennink, B. (2009). *The Essence of Research Methodology*. Springer Berlin Heidelberg.
- Jöreskog, K. G. (1969). A general approach to confirmatory maximum likelihood factor analysis. *Psychometrika*, 34(2), 183–202.
- Joshi, A., Kale, S., Chandel, S., & Pal, D. (2015). Likert Scale: Explored and Explained. *British Journal of Applied Science & Technology*, 7(4), 396–403.
- House, Robert J, and Ram N. Aditya. The Social Scientific Study of Leadership: Quo Vadis? *Journal of Management*. Vol. 23 No. 3: 409-473

- Jago, Arthur G. 1982. *Leadership: Perspectives in Tehory and Research* . *Management Science*. Vol. 28. No. 3.
- Locke, et al. 1991. *The Essence of Leadership*. Canada: Lexington Book An Imprint od Macmillan, Inc.
- Mansyur, M; Kartika, Tina. (2020)Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Coronavirus Disease (Covid-19) Dengan Pendekatan Komunikasi, Media Dan Budaya. *Al-Mishbah: Jurnal Ilmu*
- Meijer, A. J, Curtin D., & Hillebrandt, M. (2012). Open government: connecting vision and voice. *International Review of Administrative Sciences*, 78(1), 10–29.
- Muis, A. (2020). Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Nasional Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(5), 439-454. doi:<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15317>
- Mullins, L. J. 2005. *Management and Organisational Behaviour*. England: Pearson Education Limited.
- Nunnally, C, J., & Bernstein, H, I. (1994). *Psychometric Theory*. McGraw-Hill.
- Puspasari, R., 2020. Siaran pers: Insentif Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Masyarakat, Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Puspasari, R., 2020. Siaran pers: Pemerintah Waspada Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Ekonomi Indonesia, Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kombinasi*. Surakarta: Alfabeta
- Perlambatan Ekonomi Sektor UMKM. Kajian Singkat Terhadap isu Aktual dan Strategis, Maret, pp. 19-24.
- Linbeck, A, 2006, *The Welfare State Background*,

- Achievementse, Problem, Research Institute of Industrial Economics*, hlm. 32.
- Nursyam Mohammad. 1998. "Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum. Sebagai Landasan Pembinaan Hukum Nasional". Disertasi. Universitas Airlangga Surabaya, hlm. 21.
- Rakhmat Nur Hakim, "Jokowi Gelontorkan Rp 405,1 Triliun untuk Atasi Covid-19, Ini Rinciannya," Kompas, diakses 22 April 2020,
- Riska Rahman, "37,000 SMEs hit by COVID-19 crisis as government prepares aid," The Jakarta Post, 16 April 2020, <https://www.thejakartapost.com/news>
- Robbins, S. P. 2003. Organizational Behaviour. Diterjemahkan oleh PT Indeks Kelompok Gramedia Dengan Judul Perilaku Organisasi. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia
- Sorensen, E., & Torfing, J. (2011). *Enhancing Collaborative Innovation in the Public Sector. Administration & Society*, 43(8), 842–868. doi:10.1177/0095399711418768
- Rapar J.H, 1991, Filsafat Politik Plato. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 21.
- Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta.
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Sulistiani, K; Kaslam (2020), Kebijakan Jogo Tonggo Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. VOX POPULI Volume 3, Nomor 1, Juni 2020 (31-43) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

- Turner, Mark dan David Hulme. (1997). *Governance, Administratration and Development: Making The State Work.* London: MacMillan Press Ltd.
- Thoha, M. 2010. Kepemimpinan dalam Manajemen. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Lihat Peraturan Menteri Kesehatan No. 9/2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19
- Yukl, Gary. 1989 **a.** *Leadership in Organization, Second Edition.* New Jersey: Prentice Hall
- _____. 1989 **b.** Managerial Leadership: A Review of Theory and Research. *Journal of Managment*, Vo. 15, No. 2. 251-289.
- Yusuf Imam Santoso, "Menghitung dampak Covid19 terhadap dunia usaha hingga UMKM," Kontan.co.id, diakses 22 April 2020, <https://nasional.kontan.co.id>
- Yuliana, *Corona virus diseases (Covid-19); sebuah tinjauan literature, Jurnal Wellness and Healthy Magazine* Vol 2, No. 1, Februari 2020, hlm. 188.
- World Health Organization, "Coronavirus," last modified 2020,
<https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2020/04/13/covid-19-complexity-demands-sophisticated-analytics-deep-analysis-of-global-pandemic-data-reveals-important-insights/#40935b742f6e>
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/15/19133711/perubahan-istilah-terkait-covid-19-disebut-demi-dukung-penanganan-pasien>.

BIOGRAFI PENULIS

MAHATVA YOGA ADI PRADANA Lahir di Kota Malang 10 Desember 1990. Memiliki ketertarikan dalam bidang sosial dan politik. Karirnya dimulai saat mahasiswa menjadi aktivis hingga akademisi. Kemudian dilanjutkan dalam ruang lingkup pemberdayaan masyarakat lokal. Terdapat tiga penghargaan berhasil di dapatkan dari Tingkat Nasional, Provinsi hingga Kota/Kabupaten. Saat ini dirinya menjadi Dosen di Prodi Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan tetap berkontribusi pada dunia Politik yang membesarkannya.

ISKANDAR ZULKARNAIN, lahir di Boyolali, 14 September 1949, adalah Guru Besar Khusus pada Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berpangkat/golongan Pembina Utama Madya IV/e. Saat ini Iskandar merupakan Guru Besar Khusus UIN Sunan Kalijaga dengan SK Perpanjangan 5 tahun oleh Rektor berdasarkan Keputusan DIKTI yang memiliki Nomer Induk Dosen Khusus. Iskandar menyelesaikan Program Doktor Bebas Terkendali Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2000. Tahun 2017 telah menulis buku: "Sejarah dan Teologi Ahmadiyah : Mengurai Akar Konflik dan Ketegangan" Penerbit CV Biklung Nusantara, Yogyakarta.

RATNA SOFIANA, Seorang ibu yang memiliki dua putra ini lahir pada 16 Juli 1991. Saat ini dirinya sebagai dosen di dalam program studi Hukum dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Seiring dengan kemampuan akademisnya, dirinya juga mengembangkan bisnis online di bidang home industry. Penelitian yang pernah dilakukan yakni Peningkatan Kemandirian Wirausaha Bagi Santri Lintang Songo Bantul Melalui Produksi Kaos Bertuliskan Aksara Arab Pegon Sebagai Wujud Pelestarian Warisan Islam Nusantara (Dalam Penelitian Berbasis Riset Unggulan Nasional Kementerian Agama) *Halal Certification As Form Of Muslim Consumer Protection.*

RIZALDI YUSFIARTO, Bapak satu anak ini lahir pada tanggal 22 November 1990. Kemampuannya dalam bidang Perbankan dan Managemen mengantarkannya hingga menjadi Dosen dengan Bidang Ilmu Managemen Keuangan di FEBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019. Terdapat beberapa tulisan yang sudah di publikasikan. Salah satu tulisannya berjudul *Does Internet Marketing Factors with Islamic Value Improve SMEs Performance?*. Tingkat Nasional Terakreditasi (2019). Diterbitkan oleh Journal of Islamic Monetary Economics and Finance - Bank Indonesia Institute.

TERIMAKASIH PARA SURVEYOR

Muhammad Syihabuddin



Saya Syihab, akrab dipanggil Zebe, lahir di Gresik 09 Februari 1999 anak ke-2 dari 3 bersaudara, mulai TK sampai MTs (Tsanawiyah) saya sekolah di desa sendiri, lalu lanjut *nyantri* di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Gresik, sekarang saya sebagai Mahasiswa Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Santri di Pondok Pesantren Wahid Hayim, saya juga aktif di organisasi intra maupun ekstra. Kalau kalian tanya hobi, hobi saya sholawatan hehe, *ngedit-ngedit*, nulis *kadang-kadang*, motto hidupku sepertinya sama seperti kalian “*bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain*”, karena “*urip iku kadang-kadang*”, ya kadang enak kadang enggak, disyukuri aja. yuk kunjungi akun media sosial saya biar lebih dekat dengan saya, Instagram: @syihabzen Twitter: @syihabzen_ Blog: syihabzen.blogspot.com, 085546666674.

Muhammad Zidan Abadi



Namaku Zidan Abadi, biasanya dipanggil Zidan, dilahirkan di Kudus, 2 Oktober 2000. Saya asli orang kudus, saya juga santri, *nyantri* dari Madrasah Tsanawiyah di salah satu pondok Kudus. Saya juga Mahasiswa Jurusan Sosiologi Agama, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selain Mahasiswa, saya juga *nyantri* di Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krupyak Yogyakarta. Hobi saya yaitu sholawatan, futsal dan masih banyak lagi, dulu saya pernah ikut pagelaran seni di Kudus, pernah juga ikut lomba semacamnya dan alhamdulillah juara. Motto hidup saya yaitu “Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya”. Tapi disini tidak hanya Al-Qur'an saja melainkan semua ilmu. Karena “Al-Ilmu bilaa 'amalin ka syajri bilaa tsamarin”.

Tati Nur Pebiyanti



Nama Lengkap saya adalah Tati Nur Pebiyanti. Lahir pada 24 Februari 1999. Saya Lahir dan besar di Jakarta. Saya merupakan anak ke-2 dari 4 bersaudara. Ayah saya bernama Sanusi, beliau adalah seorang wiraswasta. Ibu saya bernama Juwarsih, seorang Ibu Rumah Tangga. Kedua orangtua saya adalah sosok yang selalu mendorong saya untuk terus belajar, mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan melakukan apa yang ingin saya lakukan. Karir Pendidikan saya dimulai di Sekolah Dasar (SD) Negeri 02 Meruya Selatan. Melanjutkan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 215 Jakarta. Kemudian melanjutkan lagi di Sekolah Menengah Atas (SMA) 101 Jakarta. Dan kini, saya sedang berada di semester 5 pada program studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Seraya mencari ilmu di kampus, saya juga mengikuti berbagai organisasi untuk mengembangkan skill dan menambah pengalaman. Saya aktif dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama (HMPS) dan aktif dalam komunitas Serambi UIN, Srikandi Lintas Iman dan Turun Tangan Yogyakarta.

Noer Affandi Hidayatullah HR



Noer Affandi Hidayatullah HR. Lahir di desa Pangpong, kec. Labang, kab. Bangkalan. Pada tanggal 22 januari 1999. Saya merupakan anak pertama dari dua tiga bersaudara. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di universitas islam negeri sunan kalijaga, progam studi sosiologi Agama, fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Saya mempunyai hobi dalam bidang desain, tulis menulis, travellling, dan mengamati realitas sosial. Saya memiliki keinginan agar bisa memberikan manfaat kepada orang banyak dalam hal kebaikan.

Moh. Khoiruddin



Moh Khoirudiin atau kerap dipanggil hoir, lahir di Bujur Tengah Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan Madura pada tanggal 27 Juni 1998. Ia anak ke 6 (enam) dari 7 (tujuh) bersaudara, pasangan dari sutiba dan marnidin. Saat ini hoir menempuh pendidikan di Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2016 ia menyelesaikan studinya di Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan Madura. Selain kuliah, Hoir menyibukkan dirinya di berbagai kegiatan kemahasiswaan diantaranya Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Sosiologi Agama (SA), ia menjabat sebagai Ketua. Kegiatan selanjutnya ia menjabat sebagai Koordinator Pengembangan Sumber Daya Anggota (PSDA) di Forum Komunikasi Mahasiswa Santri Banyuanyar dan ia juga menjabat sebagai pengurus di bidang Kajian Intelektual di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) rayon pembebasan komisyariat Ushuluddin Dan Pemikiran Islam. Selain itu ia juga aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Korps Dakwah Islamiah Sunan Kalijaga (KORDISKA) sebagai pengurus di Bidang Penerbitan. Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga ini juga menekuni di bidang literasi. Ia sangat senang membaca atau pun menulis.

Susiyati



Nama saya Susiyati. Lahir di Desa Rujing (Sukaoneng) kec. Tambak kab. Gresik pada tanggal 01 September 2000. Saya merupakan anak ke-tiga dari tiga bersaudara. Alhamdulillah saya termasuk anak yang beruntung dari kakak-kakak saya, dikarenakan bisa merasakan dan mengenyam pendidikan di dunia perkuliahan ditambah tanpa memikirkan biaya studi. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, program studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Saya mempunyai hobi travelling, bermain badminton, dan juga karaokean. Saya memiliki keinginan untuk sukses di umur 25 dengan usaha bisnis yang akan saya mulai di tahun ini, bantu aminkan dan doanya teman-teman semoga terkabulkan, Aamin. Itulah sedikit biodata dari saya. Sekian, dan terima kasih.

Fathur Rohman



Fathur rohman, lahir di Lamongan, pada tanggal 01 januari 1998. Saya anak ke 6 dari 8 bersaudara. Saat ini sedang menempuh pendidikan s1 di Universitan Islam Uin Sunan Kalijaga Progam Studi Sosiologi Agama, fakultas ushuluddin dan pemikiran islam. Aktif di organisasi intra maupun ekstra. Saya memiliki hobi seperti membaca, tulis menulis, jalan-jalan, makan-makan, jogging, dan lain sebagainya. Saya juga aktif di komunitas difabel dan menjadi relawan aktif di pusat layanan difabel di kampus saya. saya berharap agar saya kelak menjadi pribadi yang luhur dan bermanfaat untuk orang banyak khususnya bagi kedua orang tua saya.

Muhammad Ulin Nuha



Muhammad Ulin Nuha. Lahir di desa Guyangan, kec. Bangsri, kab. Jepara. Prov. Jawa Tengah Pada tanggal 23 Juni 1998. Saya merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta program studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, saya mempunyai hobi Berdagang dan Travelling. Untuk kedepannya saya mempunyai harapan supaya menjadi orang yang bermanfaat bagi agama dan bangsa.

Nur Rif'ah Hasaniy



Nur Rif'ah Hasaniy, lahir di Lumajang pada 6 November 1999. Kini tinggal di Ponorogo bersama keluarga, ayah Aksin Wijaya, ibu Ruffi'ah dan empat saudari, yang selalu membimbing, memotivasi dan memberi dukungan. Menamatkan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Ma'arif Ponorogo (2007-2012), Mts. Nurul Jadid (2013-2015), MA Nurul Jadid (2016-2018), dan saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 5 Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sembari menuntut ilmu dikampus, saya juga mencari pengalaman di Srikandi Lintas Iman (Srili) dan Gus Durian Yogyakarta.

Bagas Wastu Sudayu



Saya Bagas Wastu Sudayu lahir di Klaten tahun 2000, saya anak kedua dari empat saudara, saya memiliki hoby vespaan, saya tinggal di Klaten tidak kota tidak desa juga, dan saya memiliki semboyan hidup saya "hiasilah hidupmu dengan ketataan dan jangan hiasi dirimu dengan hal buruk".

Agung Bayu Saputra



Saya lahir di kota Rembang, 15 Mei 2000. Saat ini saya menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta prodi Sosiologi Agama. Hobi saya adalah fotografi. Moto hidup "Oleh seneng nanging ojo nganti lali kahanan. Oleh susah nanging ojo nganti kegowo kahanan".

Ria Arianti



Nama saya Ria Arianti, lahir di Serupa Indah Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. Saya merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri UIN Sunan Kalijaga, dengan Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Saya tidak hanya aktif dalam perkuliahan saya juga aktif di Organisasi seperti Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), saya juga aktif dalam kegiatan perempuan (Sarinah). Hobi saya cukup

beragam ketika dibangku SMA saya sangat Hobi Bermain Teater dan Menari, saya pernah menjadi ketua Teatrer di sekolah dan seringkali mengikuti ajang perlombaan teater dan tari, kemudian ketika masa kuliah saya mulai mencoba untuk fokus pada kegiatan Organisasi yang saya ikuti, membangun relasi yang luas, dan mencoba membangun peluang peluang bisnis kecil kecilan. Sesuai dengan cita cita saya ingin menjadi Seorang Perempuan Pembisnis dan Politikus.

Amalia Ziya Muktasima



Nama saya Amalia Ziya Muktasima, saya dilahirkan di Sleman, 26 Maret 2000. Saya mempunyai saudara kembar loh, saya salah satu Mahasiswa Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya aktif di berbagai organisasi salah satunya HMPS (Himpunan Mahasiswa Program Studi) Sosiologi Agama, saya disana menjabat sebagai Wakil Ketua, lalu aktif di organisasi ekstra seperti PMII, dan lain sebagainya. Hobi saya Traveling (jalan-jalan), *njajan*, pokoknya random lah heehehe. Yuk kunjungi Instagram saya @amaliaziya, jangan lupa di follow, motto hidup saya yaitu "khoirun naas 'anfauhum lin naas". Wassalam.

Muhamad Fathur Rahman



Haloo gaess... Perkenalkan nama saya Muhamad Fathur Rahman biasa dipanggil Thur_gan, pertama kali menghirup okisgen di dunia ini pada tanggal 02 Agustus 2000. Saya berasal dari salah satu daerah yang terkenal dengan walinya yang bernama Sunan Kalijaga yaitu Derah Demak tepatnya Desa Jungpasir Rt.01/Rw.05. Saya Mahasiswa Sosiologi 2018 UIN Sunan Kalijaga. Saya memiliki hobi travelling, terlebih jika mengeksplor hal-hal baru karena itu pasti berdampak pada wawasan dan pengetahuan yang baru juga. Karena sejatinya manusia adalah makhluk yang suka bereksplorasi. Ada pepatah yang mengatakan "Pohon Beringin akan tumbuh kecil jika ditanam di dalam pot, dia akan tumbuh menjadi besar jika ditanam di lapangan terbuka", maka dari itu mari teman-teman kita bereksplorasi baik secara keilmuan maupun pengalaman. Sekian dari saya terimakasih.

Muhammad Zulfikar Fariage Al Firdaus



Lahir pada 4 Februri 2000 di desa Jatimalang kecamatan Arjosari kabupaten Pacitan. Saya merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas ushuluddin dan pemikiran islam, program studi Sosiologi Agama. Saya memiliki hobi dalam keolahragaan seperti bulutangkis, futsal dan juga renang, kemudian dalam bidang membaca ataupun kepenulisan dan juga hobi dalam meneliti realitas masyarakat terkhusus masyarakat desa. Saya memiliki keinginan yaitu mampu membanggakan kedua orang tua, guru-guru dan orang yang menyayangi saya serta dapat bermanfaat dalam hal kebaikan bagi keluarga bangsa dan juga agama.